

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1767, 2020

BKPM. Sistem Klasifikasi Keamanan. Akses Arsip Dinamis.

# PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020

## **TENTANG**

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES

ARSIP DINAMIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

# Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Arsip BKPM adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- 2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 3. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
- 4. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan

- informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
- 5. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
- 6. Pusat Berkas/*Central File* adalah pusat berkas atau pusat penyimpanan arsip aktif.
- 7. Pusat Arsip/Records Center adalah pusat arsip atau pusat penyimpanan arsip inaktif.
- 8. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- 9. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM dimaksudkan untuk:
  - a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan Arsip
     Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai
     dengan daftar arsip aktifnya;
  - memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
  - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM bertujuan untuk:
  - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis BKPM;
  - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis dengan prinsip cepat, tepat, dan aman;
  - c. tersedianya informasi BKPM yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis; dan
  - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan;

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan,
   penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi
   Terbatas, dan Rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan Akses Arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

- (1) Hak akses diberikan kepada pengguna internal dan pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.

- 2. pimpinan tingkat tinggi yaitu satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
- 3. pimpinan tingkat menengah yaitu satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- b. pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas dan rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
  - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam

- rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganan.
- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM diatur sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta BKPM dapat diklasifikasikan menjadi informasi sebagai berikut:
  - 1. Biasa/Terbuka;
  - 2. Terbatas; dan
  - 3. Rahasia.
- klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
   berbeda teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat
   klasifikasi informasinya semakin tinggi tingkat
   pengamanannya;
- c. klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pengaturan aksesnya;

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM menggunakan sarana perangkat keras/hardware dan perangkat lunak/software.
- (2) Perangkat keras/hardware sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak arsip/filing cabinet untuk menyimpan arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip Rahasia dan Sangat Rahasia;

- b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
- c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak/software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

- (1) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas;
- (2) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.

# Pasal 8

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi pejabat fungsional Arsiparis di bagian Arsip dan pengelola arsip aktif di Pusat Berkas/*Central File* BKPM.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam Pengamanan Arsip di Pusat Arsip/Records

  Center dalam menetapkan hak Akses Arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau pengelola arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di Pusat Berkas/*Central File*.

# Pasal 9

Arsip Dinamis BKPM terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yang meliputi:

- a. Biasa/Terbuka;
- b. Terbatas; dan
- c. Rahasia.

Arsip Dinamis BKPM yang termasuk kategori arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja BKPM.

# Pasal 11

Arsip Dinamis BKPM yang termasuk kategori arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis BKPM.

#### Pasal 12

Arsip Dinamis BKPM yang termasuk kategori arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengandung dampak yang luas sehingga mengganggu kinerja BKPM.

# Pasal 13

- (1) Pengamanan Arsip pada ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan Arsip kategori Biasa/Terbuka disimpan pada rak besi, arsip kategori Terbatas di simpan pada rak arsip/filing cabinet, dan arsip kategori Rahasia di simpan pada lemari besi.

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis BKPM meliputi Penciptaan daftar arsip Terbatas dan daftar arsip Rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Pusat Arsip/Records Center dan Pusat Berkas/Central File.

Tabel Klasifikasi Keamanan dan pengamanan akses Arsip Dinamis BKPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

# Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

# BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENGAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	PLASIF INASI		PEAMAINAIN	INTERNAL	EKSTERNAL			
ï	RN	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	DAL					
1.	RN.01	Penyusunan Rencana Strategis	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat	
		(Renstra) BKPM		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan Industri	
		- Dokumen Renstra		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	Agribisnis dan Sumber	
				Internal	Penegak Hukum		Daya Alam Lainnya	
ų	RN.02	Penyusunan Rencana Umum	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat	
		Penanaman Modal (RUPM) BKPM		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan Industri	
		- Rencana Umum Penanaman		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	Manufaktur	
		Modal		Internal	Penegak Hukum			
ю	RN.03	Pembuatan Peta Penanaman	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Deputi Bidang	
		Modal Indonesia		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan	
		- Peta Penanaman Modal		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	Penanaman Modal	
				Internal	Penegak Hukum			
4.	RN.04	Kajian Rencana Pengembangan						
		Industri Berbasis Agribisnis						

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	ALASIF INASI		PEANIANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.01	Industri Berbasis Tanaman Pangan, Perkebunan dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV vang diheri	Publik, Pengawas		Direktorat Perencanaan Industri
		Kehutanan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Agribisnis dan Sumber
		- Korespondensi - Laporan Hasil Kaiian		Internal	Penegak Hukum		Daya Alam Lainnya
	04.02	Industri Berbasis Kelautan,	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Perikanan dan Peternakan		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Perencanaan Industri
		- Korespondensi - Laporan Hasil Kaiian		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Agribisnis dan Sumber Dava Alam Lainnya
က	RN.05	Kajian Rencana Pengembangan			0		
		Industri Berbasis Energi					
	05.01	Industri Berbasis Energi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Terbarukan		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Perencanaan Industri
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Agribisnis dan Sumber
		- Laporan Hasil Kajian		Internal	Penegak Hukum		Daya Alam Lainnya
	05.02		Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Terbarukan		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Perencanaan Industri
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Agribisnis dan Sumber
		- Laporan Hasil Kajian		Internal	Penegak Hukum		Daya Alam Lainnya
ø.	RN.06	Kajian Rencana Pengembangan					
		Industri Berbasis Sumber Daya Mineral					
	06.01	Industri Berbasis Sumber Daya	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Mineral Logam		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan Industri
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Agribisnis dan Sumber
		- Laporan Hasil Kajian		Internal	Penegak Hukum		Daya Alam Lainnya
	06.02	Industri Berbasis Sumber Daya	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Mineral Non Logam		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Perencanaan Industri
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Agribisnis dan Sumber
		- Laporan Hasil Kajian		Internal	Penegak Hukum		Daya Alam Lainnya
7.	RN.07	Kajian Rencana Pengembangan					
		Industri Logam, Mesin, Tekstil					
		dali micha					

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PLASIF INASI		NEAWAINAIN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	07.01	Industri Logam dan Mesin	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan Industri
		- Laporan Hasil Kajian		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	•	Manufaktur
				Internal	Penegak Hukum		
	07.02	Industri Tekstil dan Aneka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan Industri
		- Laporan Hasil Kajian		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	•	Manufaktur
				Internal	Penegak Hukum		
φ	RN.08	Kajian Rencana Pengembangan Industri Kimia					
	08.01	Industri Kimia Dasar	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan Industri
		- Laporan Hasil Kajian		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	Manufaktur
				Internal	Penegak Hukum		
	08.02	Industri Barang Kimia dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Farmasi		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Perencanaan Industri
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Manufaktur
		- Laporan Hasil Kajian		Internal	Penegak Hukum		
9,	RN.09	Kajian Rencana Pengembangan					
		Industri Alat Transportasi dan					
		Telematika					
	10.60	Industri Alat Transportasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas	ļ	Perencanaan Industri
		- Laporan Hasil Kajian		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Manufaktur
	09.05	Industri Telematika	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan Industri
		- Laporan Hasil Kajian		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	•	Manufaktur
				Internal	Penegak Hukum		
10.	RN.10	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa Perdagangan dan Pariwisata					

Kachalania   Kachalania   Kachalania   Fejabat Bescon III (Pejabat Pengawas Pengawas I Laporan Hasil Kajian   Pejabat Bescon III (Pejabat Pengawas Pengawas Kachalania Pengawas I Kachalania Pengawas Rewenangan), Pengawas Bengak Hukum I Kajian Rencana Pengembangan Pengamas Acesehalan, Pendidikan, Kachalania Pendidikan, Kawasan Ekonomi Khusus, Biasa/Terbuka Pelabat Belon III (Pejabat Pengawas dan Pengaman Modal Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Biasa/Terbuka Pejabat Belon III (Pejabat Pengawas dan Pengaman Bebas dan Pebahlania Bebas kachania dan Hasil Kajian Bebas, Kawasan Berdagangan Berdaganga	NO N	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10.00   Juse Perdagangan   Biasa/Terbuka   Pejabat Bedon III (Pejabat   Pengawas   Pen		KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
10.02 Jasa Pariwisata termasuk Jasa Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Revenangan), Pengawa Pengak Hukum Revenangan), Pengawa Pengak Hukum Pengawas Kobudayaan Koraspondensi Fengambanan Modal Bidang Jasa Revenangan), Pengawa Pengak Hukum Pengawas Pengak Hukum Resehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya Ketenagakerjaan Hasil Kajian Rencan Pengak Hukum Pengawas Hukum Ketenagakerjaan, dan Jasa Kasehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ketenagakerjaan Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas Kerenagakerjaan Hasil Kajian Berbas, Katenagakerjaan Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas Lajoran Hasil Kajian Pengawas Hukum Pengawas Pengak Hukum Pengaman Modal Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas Kawasan Bkonomi khusus, Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas - Laporan Hasil Kajian Pengawas Hukum Pengawas - Korespondensi Pengak Hukum Pengawas - Korespondensi Pengak Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas - Laporan Hasil Kajian Pengak Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas - Korespondensi Kawasan Bkonomi kalinnya Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas - Korespondensi Kawasan Bkonomi kalinnya Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas - Korespondensi Fengawas - Fengawas - Fengawas - Fengawas - Fengawas - Fen		10.01	Jasa Perdagangan - Korespondensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi	Publik, Pengawas		Direktorat Perencanaan Jasa dan
10.02   Justa Pariwisata termasuk Jasa   Biasa/Terbuka   Pejabat Belon III (Pejabat   Pengawas			- Laporan Hasil Kajian		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Kawasan
Reverangen   Restore   Pengawas   Pengawas   Pengak Hukum   Rayan   Pengak Hukum   Rayan   Pengak Hukum   Rayan   Pengak Hukum   Pengak Hukum   Pengak Hukum   Pengak Hukum   Pengak Hukum   Pengak Hukum   Pendagak Hukum   Pendidikan,   Biasa/Terbuka   Pejabat Eselon III (Pejabat   Pengawas   Pen		10.02	Jasa Pariwisata termasuk Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
- Laporan Hasil Kajian  RNI.11 Kajian Rencana Pengembangan Retenagakerjaan, dan Jasa Kesehatan, Pendidikan, Lannya Lannya  11.02 Jasa Kesehatan, Pendidikan, Lannya  12.01 Kawasan Perdagangan Bebas, Kawasan Perdagangan Bebas, Kawasan Pelabuhan Bebas  RNI.2 Kawasan Bekonomi Khusus, Kawasan Bekonomi Khusus, Kawasan Bekonomi Lainnya  12.02 Kawasan Bekonomi Lainnya  12.03 Kawasan Bekonomi Lainnya  12.04 Kawasan Bekonomi Lainnya  12.05 Kawasan Bekonomi Lainnya  12.06 Kawasan Bekonomi Lainnya  12.07 Kawasan Bekonomi Lainnya  12.08 Kawasan Bekonomi Lainnya  12.09 Kawasan Bekonomi Lainnya  12.00 Kawasan Bekonomi Lainnya  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Biasa/Terbuka  Belabat Eselon III (Pejabat  Pengawas  Pengawas  Benegak Hukum  Benegak Hu			Kebudayaan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan Jasa dan
RN.11         Kajian Rencana Pengembangan Pentananan Model Bidang Jasa Kestendatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya         Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi Eselon IV yang diberi Dasa Lainnya         Pengawas Pengawas           11.02         Jasa Lainnya         Biasa/Terbuka         Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi Eselon IV yang diberi Eselon III (Pejabat Eselon III (Pej			- Korespondensi - Laporan Hasil Kajian		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Kawasan
Creenagakerjaan, dan Jasa   Lannya	11.	RN.11	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa					
Leinnya Ketnagakerjaan, dan Jasa   Ketnagakerjaan, dan Jasa   Ketnagakerjaan, Pendidikan, Pengawas   Eselon IV yang diberi   Pengawas   Pengak Hukum			Kesehatan, Pendidikan,					
11.01 Jasa Kesehatan, Pendidikan, Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Publik, Ketenagakerjaan Laporan Hasil Kajian Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas Pengawas Rawasan Pendagan) Pengawas Rewenangan), Pengawas Pengak Hukum Publik, Eselon IV yang diberi Pengawas Pengawas Rawasan Pendagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas Rewenangan), Pengawas Pengawas Pengawas Pengaman Modal Bidang Rawasan Peknomi Khusus, Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Rewenangan), Pengawas Pengawas Pengawas Rawasan Pendagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas Rewenangan), Pengawas Pengawas Rewenangan, Pengawas Pengawas Rewenangan, Pengawas Pengawas Rewenangan, Pengawas Pengawas Rewenangan, Pengawas Pengawas Rawasan Ekonomi Lainnya Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Publik, Pengawas Pengawas Pengawas Rawasan Ekonomi Lainnya Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Publik, Pengawas Pengaw			Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya					
Forespondensi		11.01	Jasa Kesehatan, Pendidikan,	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
11.02 Jasa Lainnya  11.02 Jasa Lainnya  11.02 Jasa Lainnya  - Laporan Hasil Kajian  11.02 Jasa Lainnya  - Korespondensi  - Laporan Hasil Kajian  12.01 Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas  - Korespondensi  12.02 Kawasan Ekonomi Lainnya  12.02 Kawasan Ekonomi Lainnya  12.02 Kawasan Ekonomi Lainnya  12.03 Kawasan Ekonomi Lainnya  13.04 Kawasan Ekonomi Lainnya  14.05 Jasa Lainnya  Biasa/Terbuka			Ketenagakerjaan - Korespondensi		Eselon IV yang diberi Vewenangan) Pengawas	Fengawas	1	Ferencanaan Jasa dan
11.02       Jasa Lainnya       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Publik,         - Korespondensi       - Korespondensi       - Kewenangan), Pengawas       - Eksternal dan Internal       - Eksternal dan Penegak Hukum         RN.12       Kajian Rencana Pengembangan Pengembangan Benaman Modal Bidang       Rewenangan), Pengawas       - Penegak Hukum         Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas, Adan Pelabuhan Bebas       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas)         - Korespondensi       - Korespondensi       - Korespondensi       - Korespondensi         - Korespondensi       - Korespondensi       - Korespondensi         - Korespondensi       - Korespondensi       - Korespondensi			- Laporan Hasil Kajian		newenganj, rengawas Internal	Penegak Hukum		TYC W COCIT
- Korespondensi - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian  RN.12 Kajian Rencana Pengembangan Rawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Bebas, Amasan Perdagangan Bebas, Korespondensi - Laporan Hasil Kajian - Laporan Hasil Kajian - Korespondensi - Korespondensi - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian - Korespondensi - Kapana Korespondensi -		11.02	Jasa Lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
RN.12 Kajian Rencana Pengembangan Penasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Lainnya Biasa/Terbuka Rawasan Ekonomi Lainnya Biasa/Terbuka Rawasan Ekonomi Lainnya Biasa/Terbuka Belabat Eselon III (Pejabat Pengawas Pengawas Pengawas Rewenangan), Pengawas Pengawas Pengawas Belabuhan Bebas Rewenangan), Pengawas Pengawas Pengawas Rewenangan, Pengawas Pengawas Pengawas Belabuhan Bebas Rewenangan), Pengawas			- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas	1	Perencanaan Jasa dan
RN.12       Kajian Rencana Pengembangan       Penanaman Modal Bidang       Rawasan Ekonomi       Pelabat Bidang       Pelabat Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Rewenangan), Pengawas       Publik, Pengawas       Publik, Pengawas         12.01       Kawasan Perdagangan Bebas, dawasan Pelabuhan Bebas       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       Penegak Hukum         - Laporan Hasil Kajian       Laporan Hasil Kajian       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       Pengawas         12.02       Kawasan Ekonomi Lainnya       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       Pengawas         - Korespondensi       - Korespondensi       Pengawas       Pengawas			- Laporan Hasil Kajian		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Kawasan
Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan BebasBiasa/Terbuka Eselon IV yang diberi Kewenangan), PengawasPengawas Eksternal dan InternalPengawas Eksternal dan- Korespondensi - Laporan Hasil Kajian Kawasan Ekonomi LainnyaBiasa/Terbuka Biasa/TerbukaPejabat Eselon III (Pejabat Internal PengawasPenegak Hukum Pengawas	12.	RN.12	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Kawasan Ekonomi					
Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan BebasBiasa/Terbuka Eselon IV yang diberi Kewenangan), Pengawas InternalPengawas Eksternal dan Internal Korespondensi - Laporan Hasil KajianBiasa/TerbukaPejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberiPenegak Hukum Pengawas								
Kawasan Perdagangan Bebas,Eselon IV yang diberiPengawasdan Pelabuhan Bebaskewenangan), PengawasEksternal dan- KorespondensiInternalPenegak Hukum- Laporan Hasil KajianRawasan Ekonomi LainnyaPejabat Eselon III (Pejabat- KorespondensiBiasa/TerbukaPejabat Eselon IV yang diberiPengawas		12.01	Kawasan Ekonomi Khusus,	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
- Korespondensi - Laporan Hasil Kajian - Laporan Biasa/Terbuka - Korespondensi			Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas		Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas	Pengawas Eksternal dan	ı	Perencanaan Jasa dan Kawasan
Kawasan Ekonomi Lainnya       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Publik,         - Korespondensi       Eselon IV yang diberi       Pengawas			- Korespondensi - Laporan Hasil Kajian		Internal	Penegak Hukum		
		12.02	Kawasan Ekonomi Lainnya - Korespondensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi	Publik, Pengawas	ı	Direktorat Perencanaan Jasa dan

KODE JENIS ARSIP			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	FKSTERNAL	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
- Laporan Hasil Kajian	- Laporan Hasil Kajian			kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Kawasan
RN.13 Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan						
13.01 Infrastruktur Transportasi Darat Edan Perkeretaapian - Korespondensi - Laboran Hasil Kaiian	Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian - Korespondensi - Laboran Hasil Kaiian	ΙЩ	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	,	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
a	Infrastruktur Jalan dan Jembatan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	m	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	,	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
RN.14 Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air						
14.01 Infrastruktur Energi Biaa - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Infrastruktur Energi - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Bias	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
14.02 Infrastruktur Sumber Daya Air Bia - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Infrastruktur Sumber Daya Air - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Bis	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
RN.15 Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya						
15.01 Infrastruktur Transportasi Laut Bia - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Infrastruktur Transportasi Laut - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Bia	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas	Publik, Pengawas Eksternal dan	1	Direktorat Perencanaan Infrastruktur

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	ALASIF INASI		PEAMAINAIN	INTERNAL	EKSTERNAL		
				Internal	Penegak Hukum		
	15.02	Infrastruktur Transportasi Udara	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		dan Infrastruktur Lainnya		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Perencanaan
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Infrastruktur
,	,	- Laputan nasii najian		IIIICIIIAI	1 ciicgan iiunuiii		
16.	RN.16	Fasilitasi Perizinan dan Non					
		Perizinan serta Fasilitasi Kerja					
		Sama Antar Lembaga					
	16.01	Penyusunan Skema Kerja Sama	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Pemerintah dan Swasta (KPS)		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	•	Infrastruktur
		- Laporan Kegiatan/Rekomendasi		Internal	Penegak Hukum		
		Kerja Sama					
	16.02	Penyusunan Non Skema Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Sama Pemerintah dan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan
		Swasta/Kerjasama Pemerintah		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Infrastruktur
		dan Badan Usaha (KPBU)		Internal	Penegak Hukum	•	
		- Korespondensi			)		
		- Laporan Kegiatan/Rekomendasi					
		Kerja Sama					
17.	RN.17	Fasilitasi Kawasan Ekonomi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Khusus		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Perencanaan Jasa dan
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	Kawasan
		- Laporan Kegiatan		Internal	Penegak Hukum		
18.	RN.18	Fasilitasi Kemudahan Investasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Deputi Bidang
		Langsung Konstruksi		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Perencanaan
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	Penanaman Modal
		- Laporan Kegiatan		Internal	Penegak Hukum		
19.	RN.19	Pengemasan Pemasaran (Market	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Deputi Bidang
		<i>Sounding</i> ) dan Dialog Kebijakan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perencanaan
		(Policy Dialogue)		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	Penanaman Modal
		- Korespondensi		Internal	Penegak Hukum		
		- Laporan neglatan					

N O	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
Ħ	KI	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAN	MAN MODAL				
<del>-i</del>	KI.01	Analisis Kebijakan Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan Hasil Analisis - Draf Kebijakan	Rahasia	Pejabat Eselon I (Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kebijakan bidang usaha yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
લં	KI.02	Analisis dan Penyusunan Sistem Insentif Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan Analisis - Draf Peraturan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	ı	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
က်	KI.03	Koordinasi Perbaikan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) - Laporan - Korespondensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
4	KI.04	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Usaha Penanaman Modal -Laporan -Korespondensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
ம்	KI.05	Analisis dan Penyusunan Administrasi Penanaman Modal - Letter of Intent - Konfirmasi Kegiatan Usaha - Konfirmasi Bidang Usaha - Konfirmasi Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perusahaan	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
6.	KI.06	Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Daerah					

ON N	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.01	Pelaksanaan Pemetaan Potensi dan Peluang Potensi Daerah	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi	Publik, Pengawas		Direktorat Pengembangan
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	Potensi Daerah
		- Peta Potensi - Laporan		Internal	Penegak Hukum		
	06.02	Focus Group Discussion (FGD)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Peta Potensi dan Peluang		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pengembangan
		Investasi Daerah		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	Potensi Daerah
		- Korespondensı - Laporan		Internal	Penegak Hukum		
	06.03	Workshop Pemetaan Potensi dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Peluang Investasi Daerah		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pengembangan
		- Laporan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Potensi Daerah
				Internal	Penegak Hukum		
7.	KI.07	Pengembangan Sistem Informasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait dengan	Direktorat
		Potensi Investasi Daerah (SIPID)		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	kerahasiaan data	Pengembangan
		- Laporan		kewenangan), Pengawas Internal	Penegak Hukum	potensi investasi daerah	Potensi Daerah
œ.	KI.08	Pembinaan dan Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		melalui Workshop Peningkatan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pemberdayaan Usaha
		Daya Saing Usaha Nasional		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	
		- korespondensı - Laporan		Internal	Fenegak никиш		
o,	KI.09	Kegiatan Kemitraan Usaha	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		(Matchmaking)		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pemberdayaan Usaha
		- Korespondensı		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	
		- Laporan - Perjanijan Keria Sama		Internal	Penegak Hukum		
10.	KI.10	Perkuatan Data Realisasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait dengan	Direktorat
		PMA/PMDN yang Wajib Bermitra		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	kerahasiaan data	Pemberdayaan Usaha
		Vengali Univ		Kewellallgall), religawas	renegak nukum	perusanaan	
		- korespondensi		Internal			
		- naporan					

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PLASIFIRASI		NEWNOWAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
11.	KI.11	Pelayanan Dunia Usaha					
	11.01	Asosiasi Dunia Usaha Nasional	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas	,	Pemberdayaan Usaha
		- Laporan		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		
	11.02	Pemberdayaan Pelaku Usaha	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Berbasis Teknologi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pemberdayaan Usaha
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	
E	DIA	- Laporan PDOMOST PENANAMAN MODAI		mema	renegak hukum		
-		Description of the Property of					
÷	PM.O.	Pengembangan Promosi					
	01.01	Analisis Target Promosi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas	ı	Pengembangan
		- Laporan hasil kajian dan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Promosi
		pemantauan		Internal	Penegak Hukum		
	01.02	Analisis Daya Saing Promosi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pengembangan
		- Laporan hasil kajian dan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Promosi
		pemantauan		Internal	Penegak Hukum		
	01.03	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Wilayah Amerika dan Eropa		Eselon IV yang diberi	Pengawas	ı	Pengembangan
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Promosi
		- Laporan Kegiatan		Internal	Penegak Hukum		
	01.04	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika		Eselon IV yang diberi	Pengawas	1	Pengembangan
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Promosi
		- Laporan Kegiatan		Internal	гепедак пикиш		
	01.05	Kajian Efektivitas IIPC	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat
		- Korespondensı		Eselon IV yang diberi	Fengawas		Pengembangan
		- Laporan kegiatan		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum	ı	Promosi
					0		

ON O	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	ALASIF INASI		PEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
ų	PM.02	Promosi Sektoral					
	02.01	Promosi Industri Sumber Daya	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Promosi
		Vancandonai		Terror ( Post of 1)	Firstomes		SCALOIGI
		- Notespondensi - Materi Promosi		kewenangan), rengawas Internal	Penegak Hukum	ı	
		- Laporan			D		
	02.02	Promosi Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Promosi
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Sektoral
		- Materi Promosi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		
	02.03	Promosi Infrastruktur	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Promosi
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas	1	Sektoral
		- Materi Promosi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		
က်	PM.03	Fasilitasi Promosi Daerah					
	03.01	Wilayah Sumatera dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Pengawas		Direktorat Fasilitasi
		Kalimantan		Eselon IV yang diberi	Eksternal dan		Promosi Daerah
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	1	
		- Materi Promosi		Internal			
		- Laporan					
	03.02	Wilayah Jawa dan Bali	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Pengawas		Direktorat Fasilitasi
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Eksternal dan	1	Promosi Daerah
		- Materi Promosi - Laporan		kewenangan), Pengawas Internal	Penegak Hukum		
	03.03	Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Pengawas		Direktorat Fasilitasi
		Tenggara dan Papua		Eselon IV yang diberi	Eksternal dan		Promosi Daerah
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	1	
		- Materi Promosi		Internal			
		- Laporan					
4.	PM.04	Pameran dan Sarana Promosi					
	04.01	Penyusunan Program dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Pameran
		Monitoring Pameran		Eselon IV yang diberi kemenangan) Pengawas	Pengawas	ı	dan Sarana Promosi
		Strong results		an unSura i (IrmSuration our	Trong received		

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PLASIF INASI		PEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		
	04.02	Penyelenggaraan dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Pameran
		Pameran dan Sarana Promosi		Eselon IV yang diberi	Pengawas	1	dan Sarana Promosi
		- Laporan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	renegak Hukum		
	04.03	Materi Promosi Media Cetak	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Pameran
		- Buku Investment Guide		Eselon IV yang diberi	Pengawas		dan Sarana Promosi
		- Brosur-brosur/Leaflet		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	
		- Majalah - Buku FAO		Internal	Penegak Hukum		
	04.04	Publikasi dan Distribusi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Pameran
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		dan Sarana Promosi
		- Laporan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	
		1		Internal	Penegak Hukum		
	04.05	Materi Promosi Media Elektronik	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Pameran
		- Film/Video		Eselon IV yang diberi	Pengawas		dan Sarana Promosi
		- CD/Hard Disk		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		- Multimedia/Situs Web		Internal	Penegak Hukum		
	04.06	Pelayanan Informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Pameran
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		dan Sarana Promosi
		- Laporan		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum	,	
īV.	KS	KERJA SAMA PENANAMAN MODA	AL				
ij	KS.01	Standarisasi Perizinan dan Non					
		Perizinan Penanaman Modal					
		Daerah					
	01.01	Penyusunan Standarisasi Tata Kelola Perizinan dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi	Publik, Pengawas		Direktorat Kerjasama Standarisasi Perizinan
		Nonperizinan Penanaman Modal		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		dan Nonperizinan
		Daeran - Korespondensi		ıntemal	renegak nukum	ı	renanaman modal Daerah
		- Laporan					

:	KODE		KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
S S	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL	PEKTIMBANGAN	
	01.02	Penyusunan Standarisasi Sistem Informasi Perizinan dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi	Publik, Pengawas		Direktorat Kerjasama Standarisasi Perizinan
		Nonperizinan Penanaman Modal		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	dan Nonperizinan
		Daeran - Korespondensi I ongga		IIItëritat	renegak nukum		renananan modal Daerah
<b>6</b>	KS.02	Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					
		Daerah					
	02.01	Bimbingan Teknis Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diban	Publik,		Direktorat Kerjasama
		Penanaman Modal Daerah		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Perizinan dan
		- Korespondensi		Internal	Penegak Hukum	1	Nonperizinan
		- Laporan					Penanaman Modal
							Daeran
	02.02	Pemantauan Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV vang diberi	Publik, Pengawas		Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis
		Penanaman Modal Daerah		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	Perizinan dan
		- Korespondensi		Internal	Penegak Hukum	•	Nonperizinan
		- Laporan					Penanaman Modal
		$\rightarrow$					Daerah
	02.03		Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Kerjasama
		Perizinan dan Non Perizinan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pembinaan Teknis
		Penanaman Modal Daerah		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	Perizinan dan
		- Korespondensi		Internal	Penegak Hukum		Nonperizinan
		- Laporan					Penanaman Modal
							Daerah

CN		JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
i	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
က်	KS.03	Pemeringkatan/Kualifikasi Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal - Korespondensi - Peraturan Penetapan Pemeringkatan - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan hasil penilaian pemeringkatan kelembagaan	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
4	KS.04	Supervisi Peningkatan Kualifikasi PTSP - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	•	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
വ	KS.05	Kerja Sama Penanaman Modal Luar Negeri					
	05.01	Kerja Sama Bilateral Wilayah Amerika, Eropa dan Afrika - Korespondensi - Naskah Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
	05.02	Kerja Sama Bilateral Wilayah Asia Pasifik dan Multilateral - Korespondensi - Naskah Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
	05.03	Kerja Sama Multilateral - Korespondensi - Naskah Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
	05.04	Kerja Sama Regional ASEAN dan ASEAN Negara Mitra - Korespondensi - Naskah Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri

O	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	05.04	Kerja Sama Subregional ASEAN dan Intra Kawasan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III vang diberi	Pengawas Eksternal dan	Terkait dengan kerahasiaan data	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal
		- Bahan posisi runding - Hasil Pertemuan/ Kesepakatan		kewenangan), Pengawas Internal	Penegak Hukum	kerja sama	Luar Negeri
		perundingan/Workshop					
છ	KS.06	Fasilitasi Kerja Sama Dunia Usaha					
	06.01	Fasilitasi Kerja Sama dengan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait dengan	Direktorat Kerjasama
		Dunia Usaha Internasional		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	kerahasiaan data	Penanaman Modal
		- Korespondensi - MoII/Nota Kasanahaman		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kerja sama	Luar Negeri
	00 90		Toute atou	Doiobot Easter II (Doiobot	0000	Thomas and an area	Dissiptement Variable
	00.02		lerbatas	rejabat Eselon II (rejabat	rengawas	lerkalt dengan	Direktorat kerjasama
		Indonesia ke Luar Wilayah		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	kerahasiaan data	Penanaman Modal
		Indonesia (Outward Investment)		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kerja sama	Luar Negeri
		- Data Penanam Modal Indonesia		Internal			
		di Luar Wilayah Indonesia					
		- Laporan					
7.	KS.07	Pengelolaan Informasi Peluang	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Kerjasama
		Penanaman Modal		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Penanaman Modal
		- Data Peluang Penanaman Modal		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Luar Negeri
>	T.1	PELAYANAN PENANAMAN MODAI					
H	LT.01	Pengembangan Sistem Perizinan					
İ		Berusaha					
	01.01	01.01 Tata Kelola dan Integrasi Sistem	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait dengan	Direktorat
		- Korespondensi		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	kerahasiaan	Pengembangan Sistem
		- Pedoman		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	sistem	Perizinan Berusaha
		- Laporan		Internal			

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.02	Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Peiabat Eselon II (Peiabat	Pengawas	Terkait dengan	Direktorat
		1) Pengembangan Aplikasi dan		Eselon III vang diberi	Eksternal dan	kerahasiaan	Pengembangan Sistem
		Basis Data		kewenangan). Pengawas	Penegak Hukum	sistem	Perizinan Berusaha
		- Korespondensi		Internal	)		
		- Pedoman					
		- Laporan					
		2) Pengembangan Infrastruktur					
		Keamanan dan Jaringan					
		- Korespondensi					
		- Pedoman					
		- Lanoran					
		2) Dinlamana Malania Giatam					
		o) Dukungan tekins əlstem					
		- Korespondensi					
		- Pedoman					
		- Laporan					
ų	LT.02	Pelavanan Perizinan Berusaha					
	1.0.00	Dologoon Donbontinon Dominion	Tombotos	Dolohot Daolon II (Dolohot	Downson	+0000000001	Disolatonot Dolomono
	11.02.01	relayanan berbantuan renzinan	lerbatas	rejabat Eselon II (rejabat	rengawas	karena dapat	Direktorat Felayanan
		Berusaha		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggu	Perizinan Berusaha
		1) Pelayanan Konsultasi Perizinan		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	
		Berusaha		Internal			
		- Korespondensi					
		Dodomon					
		- Laporan					
		2) Fasilitasi Pelayanan Perizinan					
		Berusaha					
		- Korespondensi					
		- Pedoman					
		- Lanoran					
		2) P					
		o) remantation relayanan Tomo dii cotii Dietii (Drop)					
		reipadu satu riiitu (risr)					
		- Korespondensi B-4					
		- redolliali					
		- Laporan					

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.02	Pelayanan Operasional Perizinan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	Direktorat Pelayanan
		Berusaha Primer dan Tersier		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggu	Perizinan Berusaha
		- Korespondensı		kewenangan), Pengawas	Fenegak Hukum	Kınerja layanan	
		- Laporan - Izin Usaha		Internal			
	02.03	Pelayanan Operasional Perizinan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	Direktorat Pelayanan
		Berusaha Sekunder		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggu	Perizinan Berusaha
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	
		- Laporan		Internal			
		- Rekomendasi Visa dan Alih					
		Status					
		- Izin Kegiatan Kantor Perwakilan					
		Perusahaan Asing (KPPA)					
		termasuk perubahan dan					
		penutupan					
	02.04	Pelayanan Operasional Perizinan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	Direktorat Pelayanan
		Berusaha Prioritas		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggn	Perizinan Berusaha
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	
		- Laporan		Internal	)	,	
		- Perizinan Berusaha					
	02.05	Pelavanan Aplikasi Penanaman	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	Direktorat Pelayanan
		Modal		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggu	Perizinan Berusaha
		- Korespondensi Permohonan Izin		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	
		Prinsip		Internal			
		- Keputusan Izin Prinsip					
	02.06	Pelayanan Perizinan Penanaman	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	
		Modal		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggu	
		- Korespondensi Permohonan Izin		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	
		Usaria 17 1 1 1 1		mema			
		- keputusan izin Usana					
		- Keputusan Angka Pengenal					
		interpolation in the state of t					
		- Keputusan Izin Usaha Kantor Demokilan Demosahasan					
		1 CI Wellings 1 CI GOGIIGGII					

N O	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	NLASIF INASI		REAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		Perdagangan Asing					
က်	LT.03	Pelayanan Fasilitas Berusaha					
	03.01	Fasilitas Sektor Primer dan Tersier	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi	Pengawas Eksternal dan	Karena dapat mengganggu	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	
		- Keputusan Menteri Keuangan		Internal			
		- Surat Rekomendasi					
		- Surat Usulan Pemberian					
		Fasilitas Perpajakan					
		- Dokumen rapat koordinasi					
	03.02	Fasilitas Sektor Sekunder	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	Direktorat Pelayanan
		- Korespondensi		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggu	Fasilitas Berusaha
		- Keputusan Menteri Keuangan		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	
		- Surat Rekomendasi		Internal			
		- Surat Usulan Pemberian					
		Fasilitas Perpajakan					
		- Dokumen rapat koordinasi					
4	LT.04	Pemantauan Kepatuhan					
		Perizinan Berusaha					
	04.01	Pemantauan Kepatuhan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	Direktorat
		Perizinan Berusaha Sektor Primer		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggn	Pemantauan
		dan Tersier		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	Kepatuhan Perizinan
		- Korespondensi		Internal			Berusaha
		- Laporan Pemantauan					
	04.05	Pemantauan Kepatuhan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	Direktorat
		Perizinan Berusaha Sektor		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggu	Pemantauan
		Sekunder		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	Kepatuhan Perizinan
		- Korespondensi		Internal			Berusaha
		- Laporan Pemantauan					
	04.03	Klinik Investasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Karena dapat	Direktorat
		- Korespondensi		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	mengganggu	Pemantanan
		- Laporan		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja layanan	Kepatuhan Perizinan
				Internal			Berusana

2	KODE	GISGA SINAL	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
2	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
VI.	KL	PENGENDALIAN PELAKSANAAN P	PENANAMAN MODAL	AL			
ij	KL.01	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					
	01.01	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan - Data Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	01.02	Konsolidasi Perkembangan Data Realisasi Penanaman Modal dengan Daerah - Korespondensi - Laporan - Data Konsolidasi Perkembangan Data Realisasi Penanaman Modal dengan Daerah	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	01.03	Workshop Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online -Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	01.04	Supervisi Implementasi LKPM Online -Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	01.05	Publikasi Penyampaian LKPM - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
<b>6</b> i	KL.02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.01	Bimbingan/Sosialisasi Ketentuan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Wilayah I,
		- Korespondensi		kewenangan)	F.ksternal dan	1	11, 111, dent 1.4
		- Laporan		Pengawas Internal	Penegak Hukum		
	02.02	Fasilitasi Penyelesaian	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Direktorat Wilayah I,
		Permasalahan Penanaman Modal		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang mengganggu	II, III, dan IV
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja BKPM	
		- Laporan		Internal			
	02.03	Fasilitasi Percepatan Realisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Wilayah I,
		Penanaman Modal		Eselon IV yang diberi	Pengawas		II, III, dan IV
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		
	02.04	Pengawalan Percepatan Realisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Wilayah I,
		Proyek Strategis Nasional (PSN)		Eselon IV yang diberi	Pengawas		II, III, dan IV
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		
	02.02	Konsultasi Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Direktorat Wilayah I,
		Penanaman Modal		Eselon IV yang diberi	Pengawas		II, III, dan IV
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		
က်	KL.03	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					
	03.01	Pengawasan Ketentuan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Direktorat Wilayah I,
		Pelaksanaan Penanaman Modal		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang mengganggu	II, III, dan IV
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja BKPM	
		- Laporan		Internal			
	03.02	Pengawasan Fasilitas Penanaman	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Direktorat Wilayah I,
		Modal		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang mengganggu	II, III, dan IV
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kinerja BKPM	
		- raporan		IIIteIIIai			

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PLASIF INASI		PERMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	03.03	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal - Korespondensi - SK Pencabutan/Pembatalan Izin Penanaman Modal	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi Kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	B. KLASIFII	B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	ARSIP DINAMIS	S FASILITATIF BADAN KO	ORDINASI PENA	NAMAN MODAL	
NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
<u></u>	ΚP	KEPEGAWAIAN					
ij	KP.01	Formasi Pegawai					
	01.01		Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Umum
		- Analisa jabatan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Analisa beban kerja		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	
				Internal	Penegak Hukum		
	01.02	_	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Umum
		- Surat permintaan persetujuan		Eselon IV yang diberi	Pengawas	•	
		formasi pada Menpan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	1	
				Internal	Penegak Hukum		
	01.03	Persetujuan dan Penetapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Umum
		Formasi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Surat persetujuan formasi dari		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	,	
		Menpan		Internal	Penegak Hukum		
		- SK Penetapan formasi					
		- SK Penetapan formasi					
	01.04	Щ	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Umum
		- SK Penetapan torması khusus		Eselon IV yang diberi	Fengawas	ı	
				Kewenangan), Pengawas	Eksternal dan Penegak Hilbim		
ų	KP.02	Pengadaan ASN PNS		TITOTTI	i ciicgan iianaiii		
	02.01	Proses Penerimaan Pegawai					Biro Umum
	_						

Ş	KODE	GISGA SINHI.	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
2	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		a. Korespondensi penerimaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		
		pegawai		Eselon IV yang diberi	Pengawas	1	
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	
		h Kenitiisan keliiliisan	Terbatas	Peiahat Eselon II (Peiahat	Pengawas	Terkait dengan	
				Eselon III vang diberi	Eksternal dan	kerahasiaan	
				kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum	kebijakan	
				Internal	)	pimpinan	
		c. Penetapan Pengumuman	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		
		Kelulusan		Eselon IV yang diberi	Pengawas	ı	
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
		d.Berkas lamaran yang tidak	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait dengan	
		diterima		eselon III yang diberi	Eksternal dan	privasi personal	
		- Surat lamaran		kewenangan), pengawas	Penegak Hukum		
		- Ijazah		Internal			
		- SKCK					
		- Kartu Kuning					
		- Surat Keterangan dokter					
		- dii (disesuaikan)					
	02.02	Pengangkatan CPNS dan PNS	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait dengan	Biro Umum
		- Nota usul dan Kelengkapan		eselon III yang diberi	Eksternal dan	privasi personai	
		penetapan Mr		Kewenangani, pengawas	renegak nukum		
		- Derkas ianiaian		mema			
		- Nota usul dan pengangkatan					
		CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun - RK CPNS/PNS Kolektif					
	02.03	Praiabatan	Biasa/Terbuka	Peiabat Eselon III (Peiabat	Publik.		Biro Umum
		- sĸ	`	Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Laporan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan	ı	
				Internal	Penegak Hukum		
က်	KP.03	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian					

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		Kerja]/Pegawai Kontrak					
	03.01	Proses Penerimaan Pegawai  - Pengumuman : seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan ujian kesehatan, kemampuan bidang, keputusan hasil ujian, wawancara  - Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	,	Biro Umum
	03.02	Pengangkatan ASN/P3K - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu Kuning - Surat Keterangan dokter - dll (disesuaikan) - SK / Perjanjian Kerja	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
4.	KP.04	Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas					
	04.01	Proses Penerimaan Pegawai  - Pengumuman : seleksi administrasi, pemanggian peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan ujian kesehatan, kemampuan bidang, keputusan hasil ujian, wawancara, - SK Pengadaan Pegawai Honorer - SK Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Biro Umum

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.02	Pengangkatan Pegawai Honorer/	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait dengan	Biro Umum
		Harian Lepas		eselon III yang diberi	Eksternal dan	privasi personal	
		- Surat lamaran		kewenangan), pengawas	Penegak Hukum		
		- Ijazah		Internal			
		- SKCK					
		- Kartu Kuning					
		- Surat Keterangan dokter					
		- dll (disesuaikan)					
		- SK / Perjanjian Kerja					
'n.	KP.05	Pembinaan/Pengembangan Karir					
		Pegawai					
	02.01	Tugas Belajar/Izin	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
		Belajar/Diklat/Kursus/Ujian		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	
		Dinas		kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	
		- Edaran/pengumuman		Internal		privasi dan	
		berkenaan dengan studi lanjut				kinerja instansi	
		- Surat menyurat permohonan					
		dari pegawai dan atau usulan					
		studi,					
		- Laporan hasil tes masuk BKPM					
		yang dituju					
		- Surat ikatan kerja					
		- Surat perjanjian izin/tugas					
		belajar					
		- Surat perintah/tugas					
		belajar/sk/surat izin					
		- Surat-surat sponsor					
		- Laporan perkembangan studi					
		- Laporan					
		halangan/ketidakmampuan/rint					
		angan selama studi					
		- Permohonan perpanjangan					
		studi					
		- Ijazah					

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Akreditasi program studi - STTPL - Sertifikat					
	05.02	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	05.03	Penyusunan Pakta Integritas	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	05.04	Penetapan Angka Kredit (PAK) - DUPAK - PAK	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	05.00	Hukuman Disiplin - Surat Pemanggilan -Surat Peringatan -Berita Acara Pemeriksaan -Pernyataan Tidak Puas -Permohonan Banding -SK Ketetapan Banding	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	05.06	Penghargaan dan Tanda Jasa - Administrasi - SK - Sertifikat/ Piagam	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi Kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	,	Biro Umum

ON ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
۰.	KP.06	Mutasi Pegawai					
	06.01	Alih Status - Surat Permohonan - Surat Alih Tugas/Perpindahan - Surat Keputusan - Surat Tugas - Nota persetujuan/pertimbangan BKN	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	06.02	Mutasi Keluanga - Surat Izin Pernikahan/Perceraian - Surat Penolakan Izin - Surat Nikah / Cerai - Akte Kelahiran Anak - Surat Keterangan Adopsi Anak - Surat Keterangan Meninggal dunia	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	06.03	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan - Nota Usul Kenaikan Pangkat/Golongan - SK Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	06.04	Kenaikan Gaji Berkala - Usulan - Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	06.05	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan - Usulan dan SK Kenaikan Jabatan - Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum

ON ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES	70	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Usulan dan SK pemberhentian Jabatan					
	06.06	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai - Usulan - Nota persetujuan - Surat Persetujuan - Sk	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	0.00	Peninjauan Masa Kerja - Usulan - Nota persetujuan - SK	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kineria instansi	Biro Umum
	06.08	Penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Berkas BAPERJAKAT - Administrasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
7.	KP.07	Administrasi Pegawai					
	07.01	Data/Keterangan Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	07.02	Dokumentasi Identitas Pegawai  - Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu  - Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan  - KP4  - Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	07.03	Penønmisan LHKPN	Biasa /Terbuka	INTERNAL Pejahat Eselon III (Pejahat	EKSTERNAL Publik		Biro Umum
			Diabal) tot Dana	Esclon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	
	07.04		Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
φ	KP.08	Cuti Pegawai					
	08.01	Cuti Besar - Surat Permohonan Cuti - SK Cuti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	08.02	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan - Surat Permohonan Cuti - SK Cuti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	08.03	Cuti Alasan Penting - Surat Permohonan Cuti - SK Cuti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	08.04	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) - Surat Permohonan Cuti - SK Cuti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
9.	KP.09	Kesejahteraan Pegawai					
	09.01	Layanan Kesehatan Pegawai - Rekam Medis - Kartu Anggota	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum

Ş	KODE	TENIS ARSID	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
)	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Rekam Medis - Surat Keterangan Sehat - Surat Keterangan Sakit		Internal			
	09.05	Asuransi Pegawai - Administrasi Pendaftaran - Penawaran asuransi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	09.03	Tabungan Perumahan - Administrasi Pendaftaran - Penawaran Perumahan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	09.04	Bantuan Sosial - Tanda Terima - Ucapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
	09.05	Rekreasi/Kesenian/Olahraga - Penetapan Anggaran - Administrasi - Laporan pertanggungjawaban	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
10.	KP.10	Pemberhentian Pegawai					
	10.01	Pemberhentian Dengan Hormat a. Pemberhentian Tanpa Hak Pensiun/Karena Pensiun - Permohonan Pemberhentian - Penetapan Pemberhentian pegawai - Usulan Penetapan Pensiun Pegawai - Usulan Penetapan Pensiun Janda/ Duda - Penetapan pemberhentian	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum

N N	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PLASIF INASI		NEWINAIN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		pegawai b. Pemberhentian Karena Meninggal - Surat Kematian - Penetapan pemberhentian pegawai karena meninggal - Usul Penetapan Pensiun Janda/ Duda - Usulan Penetapan Pensiun Janda/ Duda - Penetapan pemberhentian					
	10.02	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat - Usulan Pemberhentian - Penetapan Pemberhentian	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
11.	KP.11	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Kepegawaian - Pengaduan - Notula - Berita Acara Pemeriksaan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
12.	кр.12	Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
		- Berkas lamaran yang diterima					
		- Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya					
		- Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN					
		- SK Pengangkatan CPNS					

N O	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	ALASIF INASI		PERMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Hasil Pengujian Kesehatan					
		- SK Pengangkatan PNS					
		- SK Peninjauan Masa Kerja					
		- SK Kenaikan Pangkat					
		- Surat Pernyataan					
		Melaksanakan Tugas/					
		Menduduki Jabatan					
		- Surat Pernyataan Pelantikan					
		- SK Pengangkatan dalam					
		jabatan atau Pemberhentian dari					
		Jabatan Struktural/Fungsional					
		- SK Perpindahan Wilayah Kerja					
		- SK Perpindahan Antar Instansi					
		- SK Cuti di luar Tanggungan					
		Negara (CLTN)					
		- Berita Acara Pemeriksaan					
		- SK Hukuman					
		Jabatan/Hukuman Disiplin PNS					
		- SK Perbantuan/ Dipekerjakan					
		di luar Instansi Induk					
		- SK Penarikan Kembali dari					
		Perbantuan/Dipekerjakan					
		- SK Pemberian Uang Tunggu					
		- SK Pembebasan dari Jabatan					
		Organik karena diangkat sebagai					
		rejapar regara					
		- SK Fengalinan FNS					
		- SK Pemberhentian sebagai PNS					
		- SK Pemberhentian Sementara					
		- Surat Keterangan Pernyataan					
		Hilang					
		- Surat Keterangan Kembalinya PNS vang dinyatakan hilang					
		Similar frames from Similar frames					

NUMBER   ALGARITHANI   SER PERGENTAL   SER PERGENTAL	NO		JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Strengstation Name   - Strengstation Name		KLASIFIKASI		KEAMANAN		STERNAL		
Sunta perhalkan Tanggal Tahun			- SK Penggantian Nama					
Suran Witeral / Cerai			- Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran					
Acta Kellarium   - Istan Formulir PUNS   Ebrita Acara Prograbbilan    - Sturpal/Janji PNS akan Jabatan     - Surrat Retrangan Marjadi     - Surrat Keterangan Mutasi     - Surat Keterangan Peningkatan     - Surat Keterangan Peningkatan     - Surat Keterangan Peningkatan     - Surat Keterangan Peningkatan     - Penetipan Angka Kredit     - Jabatan Fungsioral     - Surat Keterangan Hasil     - Surat Izin Bepergan ke Juar     - Surat Izin Bepergan ke Luar     - Surat Izin Bepergan ke Luar     - Surat Izin Bepergan ke Luar     - Surat Izin Bepergan ke Juar     - Sura			- Surat Nikah/Cerai					
- Islam Permular PUPMS   - Islam Permular PUPMS   Surma Permular Pumps Pupms   Surma Permular Pumps Pupms   Surma Permular Pupms Pupms Pup			- Akta Kelahiran					
Sumpah, Japan PNS dan Jabatan			- Isian Formulir PUPNS					
Surrate New Gran Jabatan			- Berita Acara Pengambilan					
Strate Pernohonan Menjadi    - Strate Kerenagan Mutasi    - Strate Kerenagan Menjagal    - Strate Kerenagan Menjagal    - Strate Kerenagan Menjagal    - Strate Kerenagan Penjagatan Pendelidan    - Strate Kerenagan Penjagatan    - Strate Kerenagan Hasil    - Strate Mensagan Hasil    - Strate Penberitahuan Kenaikan    - Strate Penberitahuan Penaikan    - Strate Penberitah pada Jabatan    - Strate Penberitah pada Jabatan    - Strate Penberitah pada Jabatan    - Strate Penberitahuan Penaikan    - Strate Penberitahuan Penaikan			Sumpah/Janji PNS dan Jabatan					
Surat Ketrangan Mutasi			- Surat Permohonan Menjadi					
Surat Keterangan Mutasi			Anggota Parpol					
Keluanga			- Surat Keterangan Mutasi					
- Surat Keterangan Meninggal Duniat Keterangan Peningkatan - Surat Keterangan Peningkatan - Pendidikan - Pendidikan - Pendidikan - Surat Keterangan Hasil - Surat Keterangan Hasil - Surat Penderitahuan Kenaikan - Surat Penderitahuan Kenaikan - Surat Penderitahuan Kenaikan - Surat Penderitahuan Kenaikan - Surat Jangsel Jain Belajar - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar			Keluarga					
Dumia Poutidikan Pendidikan Penditian Kinasa Pend			- Surat Keterangan Meninggal					
- Surat Keteangan Peningkatan - Pendidikan - Pendidikan - Pendidikan - Pendidikan - Pendidikan Pungsional - Surat Keterangan Hasil - Surat Keterangan Hasil - Surat Penberitahuan Kenaikan - Surat Tugas/ Izin Belajar Dalan/ Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar - Six Penempatan Penarikan - Six Penempatan Penarikan - Six Penempatan Penarikan - Six Penempatan pada Jabatan - Six Penempatan pada Jabatan - Six Penangkatan pada Jabatan			Dunia					
Pendidikan			- Surat Keterangan Peningkatan					
- Penetapan Angka Kredit - Jubatan Pingsional - Surat Ketrangan Hasil - Surat Ketrangan Hasil - Surat Ketrangan Hasil - Surat Pemberitahuan Kenaikan - Surat Prugas/ Lin Belajar - Dalam/ Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar - Surat Izin Belajar -			Pendidikan					
Jabatan Fungsional			- Penetapan Angka Kredit					
- Surat Keterangan Hasil - Surat Penelitian Khusus - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar - Surat Izin Behajar - Surat Izin Belajar - Surat			Jabatan Fungsional					
Penelitian Khusus - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Jiazah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Penempatan/Penarikan - SK Penempatan/Penarikan di luar Instansi Induk			- Surat Keterangan Hasil					
- Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Ijazah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			Penelitian Khusus					
- Surat Tugas / Izin Belajar Dalam / Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Ijazah / Sertifikat - Sik Penempatan / Penarikan Pegawai - Sik Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			- Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala					
- Surat Izin Bepergian ke Luar Negeria Negeria - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardal) PNS - ijazah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			- Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Inar Negeri					
Negeri - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Ijazah/Sertifikat - Sk Penempatan/Penarikan Pegawai - Sk Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			- Surat Izin Bepergian ke Luar					
- Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Ijazah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			Negeri					
(Kardaf) PNS         - Ijazah/Sertifikat           - SK Penempatan/Penarikan         - SK Pengawai           - SK Pengangkatan pada Jabatan         - SK Pengangkatan pada Jabatan			- Kartu Pendaftaran Ulang					
- Ijazah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			(Kardaf) PNS					
- SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			- Ijazah/Sertifikat					
- SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			- SK Penempatan/Penarikan					
- SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			Pegawai					
			- SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk					

0 N	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat Pertimbangan Status PNS					
		- SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS					
		- Surat Pernyataan Pengunduran					
		Diri dari Jabatan Organik karena					
		Dicalonkan sebagai Kepala/Wakil					
		Kepala Daerah					
		- SK Pensiun					
13.	KP.13	Berkas Perseorangan ASN P3K/	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Mengungkapkan	Biro Umum
		Honorer		eselon III yang diberi	Eksternal dan	Rahasia/Data	
		- Surat Lamaran		kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	Pribadi	
		- Ijazah svev		Internal			
		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1					
		- Kartu Kuning					
		- Surat Keterangan Dokter					
		- Sk Pengangkatan, dll (discussifes)					
7	11 47	(uiscsuaikaii)	D: //P:	D-:-L F1-: III /B-:-L	D.1.131.		D: 11
÷	NF.14	Organisasi non nedinasan	biasa/lerbuka	rejabat Eselon III (rejabat	Fublik,		Biro Omum
		- AD/ARI		Eselon IV yang diberi	rengawas		
		- Korespondensı		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		
ij.	OT	ORGANISASI DAN KETATALAKSA	ANAAN				
ij	OT.01	Organisasi					
	01.01	Analisis Organisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum
		- Analisis organisasi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Struktur tugas dan fungsi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		organisasi		Internal	Penegak Hukum		
	01.02		Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum
		- Hasil evaluasi organisasi		Eselon IV yang diberi kewenangan). Pengawas	Fksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
64	OT.02	Tata Laksana					
	02.01	Penyusunan Sistem dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum

Ş	KODE	GISGA SINAI.	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
;	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		Prosedur Kerja - SOP/ Prosedur Tetap		Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas	Pengawas Eksternal dan		
	02.02	Pembakuan Sarana Kerja - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas	Publik, Pengawas Eksternal dan	1	Biro Umum
	02.03	Analisis Jabatan/Analisis Manajemen - Uraian jabatan - Analisis beban kerja	Biasa/Terbuka	Internal Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Penegak Hukum Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Biro Umum
	000	_	D:	Dej-L-4 Frank MI (Dej-L-4	P. d. iii.		D: 11
	02.04	Analisis Standar Kompetensi Jabatan - Analisis Standar Kompetensi Jabatan Struktural - Analisis Standar Kompetensi Jabatan Pungsional	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi Kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
	OT.03	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
H.	HK	HUKUM					
<del>-</del> i	HK.01	Penyusunan Produk Hukum - Korespondensi - Draf Produk hukum - Notulensi - Produk Hukum BKPM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Pusat Bantuan Hukum
α <b>i</b>	HK.02	Penyusunan Naskah Kerja Sama Selain Penanaman Modal - Naskah kerja sama (kontrak, perjanjian, MoU, PKS)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi mitra kerja	Pusat Bantuan Hukum

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
က်	НК.03	Ratifikasi Perjanjian Internasional - Korespondensi - Draf Produk hukum (hasil	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi mitra kerja	Pusat Bantuan Hukum
		- Notulensi - SK Tim					
4	HK.04	Dokumentasi Produk Hukum - Produk Hukum Internal dan Eksternal	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi Kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Pusat Bantuan Hukum
က်	HK.05	Sosialisasi / Penyuluhan dan Pembinaan Hukum - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	T	Pusat Bantuan Hukum
છ	HK.06	Kasus atau Sengketa Hukum					
	06.01	Pidana - Surat Tugas - Korespondensi - Berita Acara Penyitaan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perkara	Pusat Bantuan Hukum
	06.02	Perdata  - Surat kuasa  - Berkas Panggilan Sidang, Gugatan, Jawaban, Putusan Sela, Replik, Duplik, Alat Bukti, Kesimpulan, Putusan - Berkas banding meliputi Banding, Putusan Banding - Berkas Kasasi meliputi Panggilan Kasasi, Memori Kasasi, Putusan Kasasi - Berkas Peninjauan Kembali meliputi Panggilan Peninjauan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perkara	Pusat Bantuan Hukum

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		Kembali, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Peninjauan Kembali, Jawaban Peninjauan Kembali, Putusan Peninjauan					
	06.03	Tata Usaha Negara - Surat kuasa - Berkas Panggilan Sidang, Gugatan, Jawaban, Putusan Sela, Replik, Duplik, Alat Bukti,	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perkara	Pusat Bantuan Hukum
		Kesimpulan, Putusan  - Berkas banding meliputi Panggilan Banding, Memori Banding, Putusan Banding  - Berkas Kasasi meliputi Panggilan Kasasi, Memori Kasasi, Putusan Kasasi  - Berkas Peninjauan Kembali meliputi Panggilan Peninjauan Kembali, Memori Peninjauan Kembali, Jawaban Peninjauan Kembali, Jawaban Peninjauan Kembali, Jawaban Peninjauan					
		Kembali					
	06.04	<b>06.04</b> Tata Negara - Surat kuasa	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi	Pengawas Eksternal dan	Terkait dengan kerahasiaan data	Pusat Bantuan Hukum
		- Jawaban - alat bukti		kewenangan)	Penegak Hukum	perkara	

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	20 90	Arbitrase	Terhatas	Peiahat Eselon II (Peiahat	Pengawas	Terkait dengan	Prisat Bantilan
		- Surat kuasa		eselon III vang diberi	Eksternal dan	kerahasiaan data	Hukum
		- Konganon dan si			Penegal Hillim	creviaed	
		- Notifikasi		Now Citatigati)	i ciicgan iianaiii	pervara	
		- Gugatan					
		- landahan					
		- Dutusan sala					
		Tacasan sola					
		- Iranskrip nearing					
		-Alat Bukti Tambahan					
		- Transkrip saksi					
		- Putusan Arbitrase					
		- Upaya hukum					
7.	HK.07	Opini / Kajian / Telaah Hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Pusat Bantuan
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Hukum
		- Hasil Telaah		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
21	Qd	PEDENCANAAN PROCESSAM DAN A	ANCCADAN				
ij	PR.01	Penyusunan Kebijakan dan					
		Strategi Pembangunan					
	01.01	Rencana Pembangunan Jangka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Perencanaan
		Panjang / Master Plan (RPJP)		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
				Internal	Penegak Hukum		
	01.02	Rencana Pembangunan Jangka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Perencanaan
		Menengah (RPJM)		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
				Internal	Penegak Hukum		
4	PR.02	Rencana Kerja					
	02.01	Usulan Kegiatan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Perencanaan
		- Matriks usulan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
		- Nota dinas		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
	0000		į	michilal	reliegak nukulli		į
	02.02	Kencana Kerja BKPM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Fublik,	-	Biro Perencanaan

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
				Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Program dan Anggaran
	02.03	Renoana Kerja berdasar Pagu Indikatif - Matriks renoana kerja sesuai dengan pagu indikatif - Nota Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	02.04	<b>02.04</b> Inisiatif Baru / New Inisiatif	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	02.05	Usulan Perubahan rencana kerja - Matriks Perubahan - Nota Dinas usulan perubahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
က်	PR.03	Penetapan Kontrak Kinerja					
	03.01	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	03.02	Pimpinan Unit Kerja	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	03.03	Staf/Pejabat Pungsional Tertentu dan Fungsional Umum	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	ı	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
4.	PR.04	Perencanaan Anggaran					
	04.01	Penyusunan Rencana Anggaran	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Perencanaan

						DASAR	
ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PLASIF IPASI		PERMENAM	INTERNAL	EKSTERNAL		
		(RKAKL, DIPA, POK)		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
				Internal	Penegak Hukum		
	04.02	Perencanaan PNBP	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Perencanaan
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
				Internal	Penegak Hukum		
	04.03	Standarisasi Harga Satuan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	-	Biro Perencanaan
		Perencanaan Barang		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
				Internal	Penegak Hukum		
	04.04	Standar Biaya Keluaran	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Perencanaan
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
				Internal	Penegak Hukum		
ı,	PR.05	Revisi Anggaran					
	02.01	Revisi DIPA dan POK	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Perencanaan
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
				Internal	Penegak Hukum		
	05.02	Anggaran Biaya Tambahan/	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Perencanaan
		Penambahan Anggaran		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
				Internal	Penegak Hukum		
	02.03	APBN Perubahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Perencanaan
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
				kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Anggaran
છં	PR.06	Pelaporan			0		

Image: Page	ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Decoration   Dec		KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
- Laporan Triwulan - Laporan Tahunan Unit kerja - Laporan Tahunan - Laporan Rhusus - Laporan Rhusus - Laporan Rhusus - Laporan Rhusus - Revenangan), pengawas - Laporan - Lapora		06.01	Laporan Berkala - Laporan Mingguan - Laporan Bulanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan) Pengawas	Publik, Pengawas Fksternal dan	1	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
- Laporan Tahunan Unit Kerja - Laporan Tahunan Tahapan Biasa/Terbuka Rewenangan), Pengawas Penegak Hukum Rincria BKPM - LAKIP HABI HUBUNGAN MASYARAKAT - HM HUBUNGAN MASYARAKAT - HMOOT Keprotokolan - Laporan Perkembangan Tahapan Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Penegak Hukum Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Penegak Hukum Penegak Hukum HuBUNGAN MASYARAKAT - HMOOT Keprotokolan Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Penegak Hukum Penega			- Laporan Triwulan - Laporan Semesteran		Internal	Penegak Hukum		
O6.02         Laporan Khusus         Terbatas         Pejabat Eselon II (Pejabat Belon II (Pejabat Belon II (Pejabat Belon II Wang diberi Besternal dan Biasa/Terbuka Biasa/Terb			- Laporan Schrösteran - Laporan Tahunan Unit Kerja - Laporan Tahunan					
06.02         Laporan Khusus         Terbatas         Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III (Pejabat			Lembaga/Instansi					
O6.03       Laporan Perkembangan Tahapan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Publik, Fengawas       -         M. Col. 1       LAKIP       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Publik, Fengawas       -         HM       HUBUNGAN MASYARAKAT       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Publik, Pengawas       -         HM.01       Keprotokolan       Kewenangan), Pengawas       Penegak Hukum       -         HM.01       Veprotokolan       Pengawas       Penegak Hukum         HM.01       Keprotokolan       Pengawas       Penegak Hukum         - Laporan       - Laporan       Pengawas       Pengakas         - Laporan       - Laporan       Pengawas       Pengawas		06.02	Laporan Khusus	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Perencanaan
06.03         Laporan Perkembangan Tahapan         Biasa/Terbuka         Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas Regardan)         Pelabat Bselon III (Pejabat Pengawas Internal Biasa/Terbuka         Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas Internal Biasa/Terbuka         Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas Internal Biasa/Terbuka         Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas Internal Biasa/Terbuka         Pengawas Pengak Hukum         Pengawas Pengak Hukum           HM         HUBUNGAN MASYARAKAT         Eselon IV yang diberi Pengawas Internal Biasa/Terbuka         Pejabat Bselon III (Pejabat Pengawas Internal Biasa/Terbuka Beslon III (Pejabat Pengawas Internal Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Beslon III (Pejabat Pengawas Internal Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Internal Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Besternal dan Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Pengawas Pengak Hukum Bengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengawas Pengak Hukum Biasa/Terbuka Pengak Hukum Bengak Hukum Bengak Hukum Bengak Hukum Biasa/Terbuka Beslon IV yang diberi Pengak Hukum Bengak Hukum Ben					kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	Anggaran
06.03         Laporan Perkembangan Tahapan         Biasa/Terbuka         Pejabat Bselon III (Pejabat         Publik, Pengawas         -           66.04         LAKIP         Biasa/Terbuka         Pejabat Eselon III (Pejabat         Penegak Hukum         -           HM         HUBUNGAN MASYARAKAT         Eselon IV yang diberi         Penegak Hukum         -           HM.0.1         Keprotokolan         Penegak Bselon III (Pejabat         Penegak Hukum           O1.01         Upacara         Biasa/Terbuka         Pejabat Eselon III (Pejabat         Penegak Hukum           - Laporan         - Undangan         Eselon IV yang diberi         Penegak Hukum         -           - Undangan         - Undangan         Internal         Penegak Hukum           - Undangan         - Eselon IV yang diberi         Penegak Hukum           - Loftar Hadir         Biasa/Terbuka         Pejabat Bselon III (Pejabat           - Korespondensi         Eselon IV yang diberi         Pengawas           - Korespondensi         Eselon IV yang diberi         Pengawas           - Korespondensi         Beselon IV yang diberi         Pengak Hukum					Internal	)	kinerja BKPM	
Legistani Progress Report   Escion IV yang diberi   Fengawas   F		06.03	Laporan Perkembangan Tahapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Perencanaan
Kewerangan), Pengawas       Eksternal dan Internal       Penegak Hukum       -         HM       HUBUNGAN MASYARAKAT       Epabat Eselon II (Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Penegak Hukum       -         HM.01       Keprotokolan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Penegak Hukum       -         O1.01       Upacara       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Penegak Hukum       -         O1.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Penegak Hukum       -         O1.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Penegak Hukum         O1.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Penegak Hukum         O1.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Penegak Hukum         - Bahan/Laporan         Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Pengak Hukum         Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Pengak Hukum         Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon III)       Pengak Hukum			Kegiatan/Progress Report		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
06.04       LAKIP       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Belon III (Pejabat Publik, Belon IV yang diberi Internal       Pengawas Besternal dan Internal       Pengawas Besternal dan Internal       Penegak Hukum         HM       HUBUNGAN MASYARAKAT       Rewenangan), Pengawas       Penegak Hukum       Penegak Hukum         O1.01       Upacara       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       Penegak Hukum       - Laporan         - Laporan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       Penegak Hukum       - Penegak Hukum         O1.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       Penegak Hukum         O1.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       Penegak Hukum         O1.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       Pengawas         Bahan/Laporan       Benan/Laporan       Penegak Hukum       Penegak Hukum					kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Anggaran
HM       HUBUNGAN MASYARAKAT       Eselon IV yang diberi       Pengawas       Eksternal dan         HM.01       Keprotokolan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Publik,       -         O1.01       Upacara       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Pengawas       -         - Laporan       Laporan       Rewenangan), Pengawas       Pengawas       Pengak Hukum         O1.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Pengawas         Chorespondensi       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Pengawas       Pengawas         Bahan/Laporan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Pengawas       Pengawas         Bahan/Laporan       Biasa/Terbuka       Pengawas       Besternal dan         Bahan/Laporan       Benegak Hukum       Pengawas         Benegak Hukum       <		06.04	LAKIP	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	,	Biro Perencanaan
HM     HUBUNGAN MASYARAKAT     Rewenangan], Pengawas     Eksternal dan Internal     Penegak Hukum       HM.01     Keprotokolan     Biasa/Terbuka     Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas - Undangan)     Pengawas       - Laporan     - Laporan     Rewenangan), Pengawas     Pengak Hukum       - Daftar Hadir     Pengak Hukum     Pengak Hukum       01.02     Kunjungan Kedinasan     Biasa/Terbuka     Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas     Pengawas       - Korespondensi     Eselon IV yang diberi     Pengawas     Pengawas       - Bahan/Laporan     Biasa/Terbuka     Pengawas     Pengawas       - Bahan/Laporan     Pengawas     Pengawas       Internal     Pengawas       - Bahan/Laporan     Pengak Hukum					Eselon IV yang diberi	Pengawas		Program dan
HM.01     Keprotokolan     Biasa/Terbuka     Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas Laporan     Publik, Pengawas     -       - Laporan     - Laporan     Biasa/Terbuka     Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas Rewenangan), Pengawas Penegak Hukum     Penegak Hukum       - Daftar Hadir     Biasa/Terbuka     Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas Rewenangan), Pengawas     Penegak Hukum       - Morespondensi     Fkorespondensi     Pengawas     Pengawas       - Korespondensi     Fkorespondensi     Pengawas     Pengawas       - Bahan/Laporan     Pengawas     Pengawas					kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Anggaran
HMM       HUBUNGAN MASYARAKAT         HM.01       Keprotokolan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas Eselon IV yang diberi       Pengawas       Pengawas         - Laporan       - Undangan       - Laporan       - Laporan       - Laporan       - Laporan         - Daftar Hadir       - Daftar Hadir       - Pengawas       - Pengak Hukum         01.02       Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat Pengawas       - Pengawas         - Korespondensi       - Korespondensi       - Rewenangan), Pengawas       - Pengawas       - Pengawas         - Bahan/Laporan       Internal       Pengawas       - Pengawas	;				Internal	Penegak Hukum		
KeprotokolanKeprotokolanPejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi - UndanganPublik, - Pengawas - Eselon IV yang diberi - Daftar Hadir- Laporan - Daftar HadirPengawas - Biasa/Terbuka- Pejabat Eselon III (Pejabat - Belon IV yang diberi - Eselon IV yang diberi - Bahan/Laporan- Publik, - Pengawas - Pengawas - Pengawas - Pengawas - Bahan/Laporan	>		HUBUNGAN MASYARAKAT					
Upacara       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Publik, Pengawas       -         - Laporan       - Undangan       - Wewenangan), Pengawas       - Eksternal dan Internal       - Pengawas         - Daftar Hadir       - Daftar Hadir       Pejabat Eselon III (Pejabat       Penegak Hukum         - Kunjungan Kedinasan       Biasa/Terbuka       Pejabat Eselon III (Pejabat       Publik, Pengawas         - Korespondensi       Eselon IV yang diberi       Pengawas         - Bahan/Laporan       Rewenangan), Pengawas       Eksternal dan Internal	-	HM.01	Keprotokolan					
- Laporan - Undangan - Undangan - Daftar Hadir - Daftar Hadir - Kunjungan Kedinasan - Bahan/Laporan - Bahan/Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Belon IV yang diberi - Reselon IV yang diberi		01.01	Upacara	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Peraturan
- Undangan - Daftar Hadir - Daftar Hadir - Daftar Hadir - Laftar H			- Laporan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
Logitar Hadir Internal Penegak Hukum Kunjungan Kedinasan Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Publik, - Korespondensi Rewenangan), Pengawas Resternal dan Internal Penegak Hukum			- Undangan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
Kunjungan Kedinasan Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat Publik, - Korespondensi Beslon IV yang diberi Pengawas - Bahan/Laporan Internal Pengawas Penegak Hukum			- Daftar Hadir		Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata Heaba Pimpinan
Eselon IV yang diberi Pengawas kewenangan), Pengawas Eksternal dan Internal Penegak Hukum		01.02	Kunjungan Kedinasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Peraturan
kewenangan), Pengawas Eksternal dan Internal Pengawak Hukum			- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
Penegak Hukum			- Bahan/Laporan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
Ilsaha Piminan					Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata Usaba Pimninan

Ç	KODE	IENIS ARSID	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
) ;	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.03	Agenda Kegiatan Pimpinan BKPM	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Peraturan
		- Jadwal Kegiatan Pimpinan		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Perundang-
		- Bahan/Laporan/Risalah		kewenangan)	Penegak Hukum	mengganggu	undangan, Hubungan
						kinerja BKPM	Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
Qį	HM.02	Dokumentasi/Liputan Kegiatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Peraturan
		- Dokumentasi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
		(kertas/foto/video/rekaman		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
		suara) - Laporan		Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
ю	HM.03	Pengumpulan, Pengolahan dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Peraturan
		Penyajian Informasi Kelembagaan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
		- Kliping koran		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
		- Brosur/Leaflet/Poster		Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata
		- Pengumuman/Pemberitaan					Usaha Pimpinan
4	HM.04	Hubungan antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Peiabat Eselon III (Peiabat	Publik.	ı	Biro Peraturan
		- Korespondensi	•	Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
		- Press release		kewenangani, Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
		- Transkrip		Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata
		- Bahan/laporan - Notulensi			)		Usaha Pimpinan
ņ.	HM.05	Penerbitan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik.		Biro Peraturan
		-Master Majalah	~	Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
		-Master Buletin		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
		- Klipping		Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata
		- Master Jurnal					Usaha Pimpinan
9.	90.MH	Publikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	-	Biro Peraturan
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
				Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata
							Usaha Pimpinan
7.	HM.07	Pemberian Penghargaan/Tanda	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	•	Biro Peraturan

ON ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		Kenang-kenangan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
				Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata
							Usaha Pimpinan
œ.	HM.08	Layanan Informasi Publik (PPID)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Peraturan
		- Korespondensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Perundang-
		- Daftar Arsip/Informasi Publik		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		undangan, Hubungan
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		Masyarakat dan Tata Usaha Pimninan
Z.	KU	KEUANGAN					
ij	KU.01	Pelaksanaan Anggaran					
	01.01	01.01 Rencana Anggaran Biaya/RKA-	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	I	Biro Umum
		KL		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	01.02	01.02 Penggajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Umum
		- SK		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		1		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	01.03	Pengeluaran Anggaran : Belanja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Umum
		Barang Habis Pakai, Belanja		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		Barang Inventaris/Barang Modal,		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		Belanja Jasa		Internal	Penegak Hukum		
αį	KU.02	Pengelolaan Perbendaharaan					

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.01	Perbendaharaan - SK Pengangkatan KPA - SK Pengangkatan PPK - SK Pengangkatan Pejabat Penandatangan SPM - SK Pengangkatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran - SK Pengangkatan Staf Pengelola Anggaran (BPP, Staf KPA, Staf PPK) - SK Pengangkatan Pengelolaan SAI	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi Kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Biro Umum
	02.02	Pajak - Surat Setoran Pajak - Faktur Pajak	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
	02.03	Penerimaan Negara Bukan Pajak - Bukti Setoran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
	02.04	Pengembalian Belanja - Surat Setoran Pengembalian Belanja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
	02.05	Pemeriksaan Kas - Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum

ON N	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.06	Pembukuan Anggaran - Buku Kas Umum - Buku Kas Pembantu - Kartu Pengawasan Kredit Anggaran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
		- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara					
က်	KU.03	Verifikasi Anggaran -Nota Hasil Verifikasi (Routing Slip)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	T	Biro Umum
4	KU.04	Akuntansi dan Pelaporan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
ъ.	KU.05	Ketatausahaan Keuangan					
	05.01	Keterangan Penghasilan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang menggangu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
	05.02	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum

7	1	JENIS ARSIP		SASAR ARII		PERTIMBANGAN	
110070	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	05.03	Permohonan Pinjaman	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas Flystemal dan	Memiliki dampak	Biro Umum
				kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	
				Internal		tungsi dan tugas BKPM	
	05.04	Iuran Keanggotaan Organisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum
				Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas	Pengawas Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
KU.06	90	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
		- Permohonan Pinjaman Luar		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	
		Negeri (Blue Book)		kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	
		- Dokumen kesanggupan negara		Internal		fungsi dan tugas	
		donor untuk membiayai (Grey				BKPM	
		book)					
		- Dokumen Memorandum of					
		dokumen sejenjsnya					
		- Dokumen Loan Agreement					
		(PHLN) seperti : draft agreement,					
		legal opinion, Surat menyurat					
		dengan tender					
		- Alokasi dan relokasi					
		penggunaan dana luar negeri, a.l.					
		: usulan luncuran dana					
		- Aplikasi penarikan dana					
		bantuan luar negeri (BLN)					
		- Otorisasi penarikan dana					
		(payment advice)					
		- Realisasi pencairan dana					
		bantuan luar negeri, yaitu: Surat					
		Perintah Pencairan Dana,SPM					
		beserta lampirannya, a.l. : SPP,					
		Kontrak, BA, dan data					

Ç	KODE	TENIS ARSID	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
) :	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		pendukung lainnya.  - Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)  - Laporan Bantuan/ Hibah  - Completion Report/ Annual Report  - Ketentuan/ peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal					
7.	KU.07	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
		b. Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM),	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
		c.Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/Semester	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
VII.	PL	PERLENGKAPAN					
1.	PL.01	Perencanaan Pengadaan					

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.01	Analisa Kebutuhan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Umum
		- Daftar kebutuhan pengadaan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	01.02	Pengaturan Tata Ruang	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum
		- Layout		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	01.03	Penyusunan Daftar Rekanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum
		Mampu		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Daftar Rekanan Mampu		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
αi	PL.02	Pelaksanaan Pengadaan					
		Barang/Jasa					
	02.01	Belanja Barang	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas		Biro Umum
		- Usulan pengadaan		Eselon III yang diberi	Eksternal dan		
		- Dokumen pengadaan		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum		
		- SPK/Kontrak		Internal			
		- Laporan Serah Terima					
		- Dokumen Pembayaran					
	02.02	Belanja Jasa Konstruksi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas		Biro Umum
		- Usulan pengadaan		Eselon III yang diberi	Eksternal dan		
		- Dokumen pengadaan		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum		
		- SPK/Kontrak		Internal			
		- Laporan Serah Terima					
		- Dokumen Pembayaran					
	02.03	Belanja Jasa Konsultan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas		Biro Umum
		- Usulan pengadaan		Eselon III yang diberi	Eksternal dan		
		- Dokumen pengadaan		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum		
		- SPK/Kontrak		Internal			
		- Laporan Serah Terima					
	70 00	Polonio Iono I cinnara	Toubotos	Daiobat Baalan II (Baiobat	Domosto		Dine Henry
	40.50	Delanja Jasa Lamnya	IELDatas	rejabat Escion II (rejabat	religawas		DIFO OILIUII

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	ICCUITIONAL		NEWWOOD	INTERNAL	EKSTERNAL		
		Usulan pengadaan     Dokumen pengadaan     SPK/Kontrak     Laporan Serah Terima     Dokumen Pembavaran		Esclon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		
რ	PL.03	Pengelolaan Barang					
	03.01	Penyimpanan/ Pergudangan - Laporan - Daftar Persediaan Barang	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
	03.02	Distribusi Barang - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Biro Umum
4	PL.04	Pemeliharaan: Pertamanan/ landscaping, Perbaikan Gedung, Kebersihan Gedung dan Taman, Pengelolaan Jaringan Listrik dan Air	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
<u>ب</u>	PL.05	Pemanfaatan Aset - Kertas kerja penghitungan tarif - Perjanjian kerja sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum
٠,	PL.06	Pengelolaan Aset/BMN					
	06.01	Izin Penggunaan Aset/ BMN - Korespondensi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum
	06.02	Inventarisasi BMN - Daftar Inventarisasi BMN	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum

CN	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
				Internal			
	06.03	Penghapusan BMN	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait privasi	Biro Umum
		- Korespondensi		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	data aset	
		- Laporan		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum		
		- Berita Acara Penghapusan BMN		Internal			
	06.04	Pelaporan BMN	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait privasi	Biro Umum
		- Laporan		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	data aset	
				kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum		
				Internal			
	06.05	Pengelolaan Bukti Kepemilikan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Terkait privasi	Biro Umum
		Aset		Eselon III yang diberi	Eksternal dan	data aset	
		- Surat Kepemilikan Aset		kewenangan), Pengawas	Penegak Hukum		
				Internal			
VIII.	RT	KERUMAHTANGGAAN					
<del>-</del> i	RT.01	Penyelenggaraan Perjalanan					
		Dinas					
	01.01		Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Umum
		- Surat Tugas		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- SPPD		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		- Laporan		Internal	Penegak Hukum		
	01.02	Luar negeri	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Umum
		- Undangan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Surat Tugas		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		- Pengurusan Visa		Internal	Penegak Hukum		
		- Surat Setkab					
		- Exit permit					
		- SPPD					
		- Laporan					
ų	RT.02	Pengelolaan Fasilitas Kantor					

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.01	Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum
		- Dokumen Pengurusan Surat-		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		Surat Kendaraan Dinas		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		- Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan		Internal	Penegak Hukum		
	02.02	Ruang Rapat dan konsumsi	Biasa/Terbuka	Peiabat Eselon III (Peiabat	Publik.		Biro Umum
		- Korespondensi	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Eselon IV vang diberi	Pengawas		
		- Laporan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		•		Internal	Penegak Hukum		
	02.03	Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum
		- Korespendensi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Laporan		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
က	RT.03	Keamanan dan ketertiban					
	03.01	Pengamanan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
		- Laporan		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	
				kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	
				Internal		fungsi dan tugas BKPM	
	03.02	Pengelolaan CCTV	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
		- Laporan		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	
				kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	
				IIII		nungsi dan tugas BKPM	
	03.03	Pengelolaan Parkir	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Umum
		- Laporan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		
ΙΧ	KA	KEARSIPAN		17071100111	Samuel Samuel		
,	-						
i	<b>KA</b> :01	Fengurusan Surat Masuk dan   Surat Keluar	biasa/lerbuka	rejabat Eselon III (rejabat Eselon IV yang diberi	Fublik, Pengawas	ı	Biro Omum
		- Agenda surat		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		- Ekspedisi surat/ pengendali		Internal	Penegak Hukum		

KAAO2   Pemelharaan Arsip   Pemelharaan Arsip   Pemelaraan Arsip   Pemelaraan Arsip   Pemelaraan Arsip   Pemelaraan Arsip   Pemelaraan Arsip   Pemegawas   Pengawas   Pengawas   Pengawas   Pengawas   Pengawas   Pengawas   Pengaman	ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
KA.02         Pennetharaan Arsip         Feston II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           02.02         Pennetharaan Arsip Akuf         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           02.02         Penyimpanan         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           02.03         Penyimpanan         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           02.04         Peninjamat dan Pengunaan         Biasa/Terbuka         Pejabat Bselon II (Pejabat         Publik           Arsip         Korespondensi         Korespondensi         Memiliki dampak           - Laperam         - Laperam         Terbatas         Eselon II (Pejabat         Pengawas         Memiliki dampak           - Laperam         - Laperam         - Laperam         Terbatas         Eselon II (Pejabat         Pengawas         Memiliki dampak           - Laperam         - Laperam         - Laperam         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengak Hukum         Kinerja BKPM           - Laperam         - Daltar Arsip Vital         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengak Hukum         Innerganga           - Laptar Arsip Perjaga         - Daltar Arsip Terjaga         <		KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
KA.02         Penneliharaan Arsip         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           02.02         Penyimpanan         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           02.02         Penyimpanan         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Memiliki dampak           02.03         Pengananan         Memiliki dampak         Memiliki dampak           02.04         Peninjaman dan Penggunaan         Biasa/Terbuka         Pejabat Eselon II (Pejabat         Pengawas         Memiliki dampak           - Kasip         Kasip         Laboran         Pengawas         Memiliki dampak         Pengawas         Memiliki dampak           - Berita Acara         Arsip         Berita Acara         Terbatas         Eselon II (Pejabat         Pengawas         Memiliki dampak           - Berita Acara Penridaan         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           - Daftar Arsip Vital         - Daftar Arsip Vital         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           - Berita Acara Penyerahan         Penyesuhan         Pengawas         Memiliki dampak           - Berita Acara Pemindahan Arsip         Terbatas         Eselon II dan Pengawas			surat					
02.01         Pemberkasan         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           02.02         Penyimpanan         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengak Hukum         Memiliki dampak           02.02         Penyimpanan         Terbatas         Eselon III (Pejabat         Pengawas         Memiliki dampak           02.03         Pemiyamanan         Araip Inaktif         Pengamasan         mengganggu           1         - Daftar Araip Inaktif         Pengamasan         mengganggu           20.03         Pemiyaman dan Penggunaan         Biasa/Terbuka         Pejabat Eselon III (Pejabat         Publik,           4         Asira Araip Inaktif         Reverangani, Pengawas         Memiliki dampak           5         Lapora         Publik,         Pengawas           6         Alih media araip         Terbatas         Eselon III dan Pengawas         Pengawas           6         Alih media araip         Terbatas         Terbatas         Pengak Hukum         Amiliki dampak           6         Alih media araip         Terbatas         Eselon III dan Pengawas         Pengak Hukum         Amiliki dampak           6         Daftar Araip Yerjaga         Terbatas         Eselon III dan Pengawas         Pengak Hukum	ςį	KA.02	Pemeliharaan Arsip					
Pengark Hukum   Pengark Huku		02.01		Terbatas	Eselon II dan Pengawas	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
Pengawas Pen			- Daltal Alsip Aktil		111611181	Penegak Hukum	yang mengganggu kinerja BKPM	
- Skema penyimpanan dan Penggangan - Skema penyimpanan dan Penggangan - Daltar Arsip Inaktif - Daltar Arsip Penggunaan dan Penggangan Pengganas Bestemal dan Penggangan Daltar Arsip yang Daltar Arsip yang Pengganas Bestemal dan Penggangan Daltim delakan Penggana Pengganas Pengganas Bestemal dan Penggangan Daltim Arsip Terjaga - Daltar Arsip Yital Salinan Arsip Terjaga - Daltar Arsip Penggana Penggangan Penggangan Penggangan Penggangan Daltar Arsip Penggana Penggangan Pengganga		02.02	Penyimpanan	Terbatas	Eselon II dan Pengawas	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
O2.03         Pentgarantshi         Pentgarantshi         Inenggarungan           Arsip         Arsip         Arsip         Pentan Arsip Inaktif         Pengawas         Feregan III (Pejabat         Publik,         Pengawas           Arsip         - Korespondensi         Eselon IV yang diberi         Pengawas         Bersernal dan Internal         Pengawas         Pengawas           - Laporan         - Laporan         - Internal         Pengak Hukum         Memiliki dampak           - Laporan         - Baftar Arsip yang         Pengalakan         Memiliki dampak           - Baftar Arsip yang         - Daftar Arsip Vital         Pengalaban Arsip Vital         Memiliki dampak           - Daftar Arsip Vital         - Daftar Arsip Ferjaga         Pengalagan Publikum         Memiliki dampak           - Baftar Arsip Terjaga         - Bertia Acara Penyarahan         Pengawas         Memiliki dampak           - Baftar Arsip Terjaga         - Bertia Acara Pemindahan Arsip         Terbatas         Belon II dan Pengawas         Pengawas           - Baftar Arsip Terjaga         - Bertia Acara Pemindahan Arsip         Terbatas         Belon II dan Pengawas         Memiliki dampak           - Bertia Acara Pemindahan Arsip         - Bertia Acara Pemindahan Arsip         Bertia Acara Pemindahan Arsip         Bertia Acara Pemindahan Arsip         Bertia Acara Pe			- Skema penyimpanan dan		Internal	Eksternal dan	yang	
C02.03         Peminjaman dan Penggunaan dan Penggunaan dan Penggunaan dan Penggunaan dan Penggunaan dan Penggunaan - Korespondensi - Laporan - Daftar Arsip yang - Berita Acara Pengelaan Arsip Vital - Daftar Arsip Vital - Daftar Arsip Pengawas - Daftar Arsip Pengawas - Daftar Arsip Vital - Daftar Arsip Pengawas - Daftar Arsip Pengawas - Laporan - Daftar Arsip Pengawas - Laporan Arsip Pengawas - Laporan - Lapora			pengamanan - Daftar Arsip Inaktif			i ciicgan i iunuiii	nienggangga kinerja BKPM	
Arsip  Arsip  Arsip  Buku peminjaman  Daluku peminjaman  C2.04 Alih media arsip  Berlon II dan Pengawas  Berlon II dan Pengawas  Aka.03  KA.04  Berita Acara Penyeahan  Saliman Arsip  C4.01 Pemindahan Arsip  Daltar Arsip  Daltar Arsip  Berlon II dan Pengawas  Eselon II dan Pengawas  Berlon II d		02.03		Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Biro Umum
- Korespondensi - Korespondensi - Kewenangan), Pengawas Bksternal dan luternal - Lapuku peminjaman - Lapukan Arsip Varatas Perjada Arsip Vital dan Arsip Vital dan Arsip Vital Arsip Perjaga - Daftar Arsip Terjaga - Berita Acara Penyasutan Arsip Memindahan Arsip			Arsip		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
- Berita Acara Peminjaman  - Laporan  - Laporan  - Laporan  - Laporan  - Daftar Arsip yang  - Berita Acara Pemindahan Arsip  - MA.04  - Berita Acara Pemindahan Arsip  - Berita Acara Pemindahan Arsip  - Berita Acara Pemindahan Arsip  - Daftar Arsip Wital  - Berita Acara Pemindahan Arsip  - Laporan  - Daftar Arsip yang  - Berita Acara Pemindahan Arsip  - Daftar Arsip Pengawas  - Berita Acara Pemindahan Arsip			- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
- Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Berita Arsip yang - Dialih mediakan - Daltar Arsip Vital - Berita Acara Penyerahan - Baltar Arsip Inaktif - Daltar Arsip - Daltar			- Buku peminjaman		Internal	Penegak Hukum		
C2.04     Alih media arsip     Terbatas     Eselon II dan Pengawas     Pengawas     Memiliki dampak       - Berita Acara     - Daftar Arsip yang     Penggar Hukum     Penegak Hukum     Penegak Hukum       KA.03     Penglodaan Arsip Vital     Terbatas     Eselon II dan Pengawas     Penegak Hukum     Memiliki dampak       - Daftar Arsip Vital     - Daftar Arsip Vital     Penegak Hukum     Penegak Hukum     Penegak Hukum       - Salinan Arsip Terjaga     - Berita Acara Penyerahan     Salinan Arsip Terjaga     Rinerja BKPM       KA.04     Penyusutan Arsip     Terbatas     Eselon II dan Pengawas     Pengawas       WA.04     Penyusutan Arsip     Terbatas     Eselon II dan Pengawas     Memiliki dampak       - Daftar Arsip     Penidahan Arsip Inaktif     Terbatas     Beselon II dan Pengawas     Pengawas       - Daftar Arsip     - Daftar Arsip     Pengamas     Memiliki dampak       - Berita Acara Pemindahan Arsip     Pengamas     Pengawas     Memiliki dampak       - Berita Acara Pemindahan Arsip     Pengawas     Pengawas     Memiliki dampak       - Berita Acara Pemindahan Arsip     Pengawas     Pengawas     Pengawas			- Laporan					
- Berita Acara - Daftar Arsip yang - Daftar Arsip yang - Daftar Arsip yang - Daftar Arsip yital dan Arsip - Daftar Arsip Vital - Daftar Arsip Terjaga - Berita Acara Penyusutan Arsip - Daftar Arsip Daftar Arsip - Daftar Arsip Daftar Arsip - Daftar Arsip - Daftar Arsip Daftar Arsip - Daftar Arsip Daftar Ars		02.04	Alih media arsip	Terbatas	Eselon II dan Pengawas	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
KA.03       Pengelolaan Arsip yang       Terbatas       Eselon II dan Pengawas       Pengawas       Memiliki dampak kinerja BKPM         KA.03       Pengelolaan Arsip Vital       Terbatas       Eselon II dan Pengawas       Pengawas       Memiliki dampak kinerja BKPM         KA.04       Penyusutan Arsip Terjaga       Terbatas       Eselon II dan Pengawas       Pengawas       Memiliki dampak kinerja BKPM         O4.01       Pemindahan Arsip       Terbatas       Eselon II dan Pengawas       Pengawas       Memiliki dampak kinerja BKPM         Berita Acara Pemindahan Arsip       Terbatas       Eselon II dan Pengawas       Pengawas       Memiliki dampak kinerja BKPM         Berita Acara Pemindahan Arsip       Pengawas       Pengawas       Pengawas       Memiliki dampak kinerja BKPM			- Berita Acara		Internal	Eksternal dan	yang	
KA.03         Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Vital dan Arsip Vital dan Arsip Vital         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Pengawas         Memiliki dampak           - Daftar Arsip Vital         - Daftar Arsip Vital         - Daftar Arsip Terjaga         - Berita Acara Penyerahan         Rinerja BKPM         Rinerja BKPM           - Salinan Arsip Terjaga         - Berita Acara Penyusutan Arsip         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Memiliki dampak           - Daftar Arsip         Penyusutan Arsip         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Memiliki dampak           - Daftar Arsip         Penindahan Arsip Haktif         Terbatas         Eselon II dan Pengawas         Memiliki dampak           - Daftar Arsip         - Berita Acara Pemindahan Arsip         Penegak Hukum         Memiliki dampak			- Daftar Arsip yang			Penegak Hukum	mengganggu	
KA.03Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Vital dan Arsip Vital dan Arsip VitalTerbatasEselon II dan PengawasPengawasMemiliki dampak- Daftar Arsip Vital- Daftar Arsip Vital- Daftar Arsip Terjaga- Berita Acara PenyerahanRinerja BKPM- Salinan Arsip Terjaga- Berita Acara Penyerahan- Berita Acara PenyerahanFengawasMemiliki dampak- A.04Penyusutan ArsipTerbatasEselon II dan PengawasMemiliki dampak- Daftar Arsip- Daftar ArsipPengawasMemiliki dampak- Berita Acara Pemindahan Arsip- Berita Acara Pemindahan ArsipPenegak Hukummengganggu			Dialihmediakan				kinerja BKPM	
Terjaga - Daftar Arsip Vital - Daftar Arsip Vital - Berita Acara Penyerahan Salinan Arsip Terjaga  KA.04 Penyusutan Arsip O4.01 Pemindahan Arsip - Daftar Arsip - Berita Acara Pemindahan Arsip - Berita BKPM - KA.04 Pengawas - Pe	က်	KA.03	Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip	Terbatas	Eselon II dan Pengawas	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
- Daftar Arsip Vital - Daftar Arsip Vital - Berita Acara Penyerahan Salinan Arsip  - Ma.04 Penyusutan Arsip  - Daftar Arsip - Daftar Arsip - Daftar Arsip - Daftar Arsip - Berita Acara Pemindahan Arsip			Terjaga		Internal	Eksternal dan	yang	
- Berita Arsip Ietjaga - Berita Acara Penyerahan Salinan Arsip  KA.04 Penyusutan Arsip  O4.01 Pemindahan Arsip - Daftar Arsip - Berita Acara Pemindahan Arsip			- Daitar Arsip Vital			Penegak Hukum	mengganggu	
- Berita Acara Penyerahan Salinan Arsip Terjaga  KA.04 Penyusutan Arsip O4.01 Pemindahan Arsip - Berita Acara Pemindahan Arsip  Berita Acara Pemindahan Arsip - Berita Acara Pemindahan Arsip			- Daitar Arsip Terjaga				Kinerja BKPM	
KA.04     Penyusutan Arsip     Terbatas     Eselon II dan Pengawas     Pengawas     Memiliki dampak       04.01     Pemindahan Arsip     Terbatas     Eselon II dan Pengawas     Memiliki dampak       - Daftar Arsip     - Berita Acara Pemindahan Arsip     Penegak Hukum     mengganggu       - Berita Brita Acara Pemindahan Arsip     Kinerja BKPM			- Benta Acara Penyerahan Salinan Arsin Teriada					
4.01Pemindahan ArsipTerbatasEselon II dan PengawasPengawasMemiliki dampak- Daftar Arsip- Berita Acara Pemindahan ArsipPenegak Hukummengganggu- Berita Acara Pemindahan ArsipKinerja BKPM	4	KA.04	Penvusutan Arsip					
n Arsip Internal Internal Eksternal dan yang Penegak Hukum mengganggu kinerja BKPM		04.01	Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas	Eselon II dan Pengawas	Pengawas	Memiliki dampak	Biro Umum
Penegak Hukum			- Daftar Arsip		Internal	Eksternal dan	yang	
Kinerja BKPM			- Berita Acara Pemindahan Arsip			Penegak Hukum	mengganggu	
							kınerja BKPM	

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.02	Pemusnahan Arsip - Surat Usulan Pemusnahan - Rekomendasi/ Pertimbangan/Persetujuan Pemusnahan - Keputusan Pemusnahan - Berita Acara Pemusnahan - Daftar Arsip Musnah - SK Tim Pemusnahan	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
	04.03	Penyerahan Arsip Statis - Surat Usulan Penyerahan - Rekomendasi/ Pertimbangan/Persetujuan Penyerahan - Berita Acara Penyerahan - Daftar Arsip Serah	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
က်	KA.05	Pembuatan Sistem Kearsipan - Tata Naskah Dinas - Klasifikasi Arsip - Jadwal Retensi Arsip - Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis - Dan lain-lain	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
۰,	KA.06	Pembinaan Kearsipan					
	06.01	Bimbingan Teknis Kearsipan/ Bimbingan Konsultasi Kearsipan - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
	06.02	Supervisi/ Pengawasan Kearsipan - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum

ON ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.03	Monitoring - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas	Publik, Pengawas Eksternal dan	1	Biro Umum
×	PT	KEPUSTAKAAN		TO THE COLUMN	1 circgay itawam		
<del>-</del> i	PT.01	Penyimpanan Bahan Pustaka - Bukti Penerimaan Koleksi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi	Publik, Pengawas	1	Biro Umum
		Datian rustaka Deposit - Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka		rewenangan), rengawas Internal	Penegak Hukum		
6	PT.02	Pengembangan Bahan Pustaka					
	02.01	<b>02.01</b> Penyusunan Buku Induk Koleksi - Buku Induk Koleksi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV vang diberi	Publik, Pengawas	1	Biro Umum
				kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		
	02.02	Penyusunan Daftar Buku	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Umum
		Terseleksi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Daftar Buku		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		
	02.03	Penyusunan Daftar Buku dalam	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Biro Umum
		Pemesanan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
		- Daftar Buku		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		
	02.04	Penyusunan Daftar Buku dalam	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Biro Umum
		Permintaan - Daftar Buku		Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas	Pengawas Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	02.05	Penyusunan Daftar Bahan Pustaka Hasil Pembelian Hadiah	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Reelon IV vang diberi	Publik,	1	Biro Umum
		Deposit, dan Hibah		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
		- Daftar Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah Deposit, dan		Internal	Penegak Hukum		
		Hibah					

ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.06	Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi	Publik, Pengawas	1	Biro Umum
		- Korespondensı - Laporan		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		
	02.07	Penyusunan Daftar Tambahan Buku (Accession List)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV vang diberi	Publik, Pengawas	ı	Biro Umum
		- Daftar Tambahan Buku		kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		
ო	PT.03	Pengembangan Bahan Pustaka					
	03.01	Penyusunan Data Katalog Koleksi - Daftar Katalog Koleksi Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum
	03.02	Penyusunan Daftar/Jajaran Kendali (Subyek dan Pengarang) - Daftar/Jajaran Kendali (Subyek dan Pengarang)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Biro Umum
4	PT.04	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi			)		
	04.01	Penyusunan Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	ı	Biro Umum
	04.02	Pelayanan Pertanyaan Rujukan dan Jawaban - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	ı	Biro Umum
ю.	PT.05	Preservasi Bahan Pustaka					
	05.01	Survei Kondisi Bahan Pustaka - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Biro Umum

ON N	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	05.02	Reprografi Bahan Pustaka - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV vang diberi	Publik, Pengawas	1	Biro Umum
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
ļ	i			Internal	Penegak Hukum		
Ä	ΤΙ	TEKNOLOGI INFORMASI					
ij	TI.01	Penyusunan Rencana Strategis/	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Pusat Pengelolaan
		Master Plan Pembangunan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Data dan Informasi
		Sistem Informasi (SIM)		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Penanaman Modal
		-Buku Rencana Strategis (Blue Print)		Internal	Penegak Hukum		
4	TI.02	Penyusunan Rencana	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Pusat Pengelolaan
		Pengembangan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Data dan Informasi
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Penanaman Modal
				Internal	Penegak Hukum		
က်	TI.03	Penyusunan Rancang bangun	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pengelolaan
		sistem/Design sistem Informasi		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Data dan Informasi
		dan Komunikasi		kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	Penanaman Modal
				Internal		Kinerja BKPIM	
4.	TI.04	Dokumentasi Arsitektur					
	04.01	Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Pusat Pengelolaan
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		Data dan Informasi
				kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum		Penanaman Modal
	04.02	Sistem Aplikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Pusat Pengelolaan
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		Data dan Informasi
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Penanaman Modal
				Internal	Penegak Hukum		
	04.03	Infrastruktur dan Sarana	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pengelolaan
		Teknologi Informasi dan		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Data dan Informasi
		Komunikasi		kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	Penanaman Modal
				Internal		кіпетја БКРМ	
ю	TI.05	Analisis Data	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pengelolaan
				eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Data dan Informasi

2	KODE	CIOCA STREET	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
2	KLASIFIKASI	JENIS AKSIF	KEAMANAN	INTERNAL	FKSTEDNAL	FERIMBANGAN	
				kewenangan), pengawas Internal	Penegak Hukum	mengganggu kineria BKPM	Penanaman Modal
<b>ં</b>	TI.06	Pengelolaan Data Base	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kineria BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
7.	TI.07	Dokumentasi Implementasi					
	07.01		Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	07.02	Sistem Aplikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	1	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	07.03	Infrastruktur dan sarana TIK	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kineria BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
ထံ	TI.08	Perekaman dan Pemutakhiran Data - Formulir Isian - Daftar Petugas Perekaman - Jadwal Pelaksanaan - Laporan Hasil Perekaman dan Pemutakhiran Data	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
o,	TI.09	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data - Perencanaan Migrasi - Pelaksanaan Migrasi - Berita Acara Kegiatan Migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi - Laporan hasil Migrasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

N ON	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
10.	TI.10	Pemeliharaan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Pusat Pengelolaan
		-Laporan pemeliharaan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Data dan Informasi
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Penanaman Modal
				Internal	Penegak Hukum		
11.	TI.11	Evaluasi sistem dan media	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Pusat Pengelolaan
		-Laporan evaluasi		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Data dan Informasi
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		Penanaman Modal
				Internal	Penegak Hukum		
12.	TI.12	Dokumen Hosting	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pengelolaan
		- Formulir permintaan hosting		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Data dan Informasi
		- Laporan hasil uji kelayakan		kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	Penanaman Modal
		- Laporan pelaksanaan hosting		Internal		kinerja BKPM	
13.	TI.13	Pengelolaan Data e-mail	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pengelolaan
		- Data e-mail		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Data dan Informasi
				kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	Penanaman Modal
				Internal		kinerja BKPM	
14.	TI.14	Keamanan Data					
	14.01	Backup Data	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pengelolaan
				eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Data dan Informasi
				kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	Penanaman Modal
		$\rightarrow$		memai		Killerja BKPM	
	14.02	Anti Virus	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pengelolaan
				eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Data dan Informasi
				kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	Penanaman Modal
	14.03	Piremall	Terbatas	Deiahat Eselon II (Peiahat	Pengawas	Memiliki dampak	Prisat Pengelolaan
	) ) : :			eselon III vang diberi	Eksternal dan	vang	Data dan Informasi
				kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu	Penanaman Modal
				Internal	)	kinerja BKPM	
ļ	1		·		ţ		
15.	TI.15	Keanggotaan/Langganan/Jaringa n	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi	Pengawas Eksternal dan	Memiliki dampak yang	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi
				kewenangan), pengawas	Penegak Hukum	mengganggu Lineria BKPM	Penanaman Modal
				monna		Mitcila Divi ivi	

	KODE		KI.ASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
0 <u>N</u>	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KEAMANAN			PERTIMBANGAN	
			NICO PROPERTY OF THE PARTY OF T	INTERNAL	EKSTERNAL		
XII.	DI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
ij	DL.01	Penyusuan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi	Pengawas Eksternal dan	Memiliki dampak yang	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		- Korespondensi - Kuesioner		kewenangan)	Penegak Hukum	mengganggu kineria BKPM	
		- Usulan Pedoman					
6	DL.02	- Buku Faliduali/ Buku Malidal Penyusunan Program Diklat					
	02.01		Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pendidikan dan
		Silabus		eselon III yang diberi kewenangan)	Eksternal dan Penegak Hukum	yang mengganggu	Pelatihan
				· )	O	kinerja BKPM	
	02.02	<b>02.02</b> Penyusunan Jadwal	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Pusat Pendidikan dan
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pelatihan
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
	000	_	- E	Internal	renegak Hukum		4
	04.03		lerbatas	rejabat Eselon II (rejabat	Fengawas	метпики фатрак	Fusat Fendidikan dan
		Modul/Materr/Bahan		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Pelatihan
				kewenangan)	Penegak Hukum	mengganggu kinerja BKPM	
	02.04	Penyusunan Panduan Fasilitator	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pendidikan dan
				eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Pelatihan
				kewenangan)	Penegak Hukum	mengganggu kinerja BKPM	
	02.05	Akreditasi Lembaga	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pendidikan dan
				eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Pelatihan
				kewenangan)	Penegak Hukum	mengganggu	
						KIIIEIJA DNIM	
		- Surat Permohonan Akreditasi					
		- Laporan Hasil Verifikasi					
		Lapangan					
		- Berita acara rapat tim penilai					
		- Surat Keputusan Penetapan					

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		Akreditasi					
		- Sertifikasi Akreditasi					
		- Laporan Akreditasi lembaga diklat					
	02.06	Sertifikasi sumberdaya manusia	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas Fleeternal dan	Memiliki dampak	Pusat Pendidikan dan
		Nothing and I		kewenangan)	Penegak Hukum	yang mengganggu kinerja BKPM	1 CIGUITOTI
		- Surat Permohonan Sertifikasi					
		- Laporan Hasil Verifikasi					
		Lapangan					
		- Berita acara rapat verifikasi					
		- Berita acara rapat tim penilai/					
		asesor					
		- Surat Keputusan Penetapan					
		Sertifikasi					
		- Sertifikat dari Sertifikasi					
		- Laporan Sertifikasi individual					
	02.07	Sosialisasi/koordinasi kebijakan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,		Pusat Pendidikan dan
		diklat		Eselon IV yang diberi	Pengawas		Pelatihan
		- Korespondensi		kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
ю ю	DL.03	Penyelenggaraan diklat		HIMITIAN	i circgan iianaiii		
	03.01	Diklat Struktural	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pendidikan dan
		- Korespondensı - Dokumen nendulmusı lainnin		eselon III yang diberi Femenangan)	Eksternal dan	yang	Pelatihan
		- Dobumen pendubung amuya		Nowellaligali)	i ciicgan i iunuiii	incugganggu kinerja BKPM	
	03.02	Diklat Fungsional - Korespondensi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III vang diberi	Pengawas Eksternal dan	Memiliki dampak vang	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		- Dokumen pendukung lainnya		kewenangan)	Penegak Hukum	mengganggu kinerja BKPM	
	03.03	Diklat Teknis dan Kemampuan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pendidikan dan

	KODE		KI.ASIFIK ASI	HAK AKSES		DASAR	TINIT PENGOLAH
0 N	KI ASIFIKASI	JENIS ARSIP	KEAMANAN			<b>PERTIMBANGAN</b>	
	ISSUI JISSUU		NEWWOOD	INTERNAL	EKSTERNAL		
		Teknis Lainnya		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Pelatihan
		- Korespondensi		kewenangan)	Penegak Hukum	mengganggu	
		- Dokumen pendukung lainnya				kinerja BKPM	
4	DL.04	Evaluasi Pasca Diklat	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pendidikan dan
		- Korespondensi		eselon III yang diberi	Eksternal dan	yang	Pelatihan
		- Kuesioner		kewenangan)	Penegak Hukum	mengganggu	
		- Laporan				kinerja BKPM	
XIII.	PA	PENGAWASAN					
ij	PA.01	Program Kerja Pengawasan					
	01.01	Program Pembinaan/Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Inspektorat
		Aparat Pengawasan Pendidikan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	01.02	Program Konsultasi dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	1	Inspektorat
		Koordinasi Pengawasan Regional		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	01.03	Program Pemantauan Hasil	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	ı	Inspektorat
		Pengawasan dan Pemeriksaan		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	01.04	Program AKIP Unit Kerja di	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	=	Inspektorat
		Lingkungan BKPM		Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
	01.05	Program AKIP BKPM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	-	Inspektorat
				Eselon IV yang diberi	Pengawas		
				kewenangan), Pengawas	Eksternal dan		
				Internal	Penegak Hukum		
ςį	PA.02	Pelaksanaan Pengawasan					

N O	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.01	Pengawasan Internal  - Administrasi pengawasan antara lain: surat penugasan, surat pemberitahuan, kertas kerja pengawasan, pedoman pelaksanaan pengawasan dll  - Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil audit (LHA), laporan hasil audit (LHA), laporan hasil audit (LHA), laporan hasil audit (LHB), laporan hasil audit (LHB), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil audit indak lanjut (TL)  - Laporan hasil audit investigasi (TLJ)  - Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	02.02	Pengawasan Eksternal  - Administrasi pengawasan antara lain: surat penugasan, surat pemberitahuan, kertas kerja pengawasan, pedoman pelaksanaan pengawasandil  - Laporan hasil andit (LHA), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		memerlukan tindak lanjut (TL)  - Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)  - Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut					
	02.03	Pengawasan Khusus - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
က်	02.04 PA.03	Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional - Laporan Hasil Pemeriksaan - Memorandum Hasil Pemeriksaan - Tindak Lanjut/ Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Inspektorat
	03.01	Pemantauan Kegiatan - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	03.02	PemantauanPenyelesaian Tuntutan Ganti Rugi - Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/ TP - Laporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat

Ş	KODE	TENIS ARSID	KLASIFIKASI	HAK AKSES		DASAR	UNIT PENGOLAH
1	KLASIFIKASI		KEAMANAN	INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Laporan Kehilangan, Berita acara kehilangan barang/ uang, SK tanggungjawab Mutlak/ surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, SK Penghapusan uang dan barang, Laporan Penyelesaian TP/ TGR					
	03.03	PemantauanPenyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	03.04	<b>03.04</b> Penerapan Barly Warning Sistem - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	03.05	Pemantauan Disiplin Pegawai - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
4	PA.04	Pengelolaan Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
က်	PA.05	Pengaduan Masyarakat - Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja BKPM	Inspektorat
۰.	PA.06	Kegiatan Pengawasan Lainnya					
	06.01	Sosialisasi Pengawasan - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat

KODE KLASIFIKASIJENIS ARSIPKLASIFIKASIHAK AKSESKEAMANANINTERNAL	KLASIFIKASI KEAMANAN INTERN	INTERN	HAK AKS INTERNAL	ES	EKSTERNAL	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
06.02         Bimbingan dan Konsultasi         Biasa/Terbuka         Pejabat Eselon III (Pejabat	Bimbingan dan Konsultasi Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pe	jabat	Publik,	1	Inspektorat
Pengawasan   Eselon IV yang diberi		Eselon IV yang c	Eselon IV yang c	liberi	Pengawas		
- Laporan   kewenangan), Pengawas		kewenangan), Per	kewenangan), Per	ngawas	Eksternal dan		
Internal	Internal	Internal	Internal		Penegak Hukum		
<b>06.03</b> Pemaparan Hasil Pengawasan Biasa/Terbuka Pejabat Bselon III (Pejabat	Pemaparan Hasil Pengawasan Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III	(Pejabat	Publik,	1	Inspektorat
- Laporan Eselon IV yang diberi		Eselon IV yang	Eselon IV yang	diberi	Pengawas		
kewenangan), Pengawas	kewenangan), P	kewenangan), P	kewenangan), P	engawas	Eksternal dan		
Internal Internal	Interna	Interna	Interna	1	Penegak Hukum		
06.04         Keikutsertaan dalam Forum         Biasa/Terbuka         Pejabat Eselon III (Pejabat	Keikutsertaan dalam Forum Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon I	II (Pejabat	Publik,	1	Inspektorat
Aparatur Pemeriksa Internal Eselon IV yang diberi		Eselon IV yau	Eselon IV yaı	ng diberi	Pengawas		
Pemerintah   kewenangan), Pengawas		kewenangan),	kewenangan),	Pengawas	Eksternal dan		
- Laporan   Internal		Intern	Intern	nal	Penegak Hukum		
<b>06.05</b> Satuan Pengawasan Intern (SPI) Biasa/Terbuka Pejabat Eselon III (Pejabat	Satuan Pengawasan Intern (SPI) Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon	III (Pejabat	Publik,	ı	Inspektorat
alian Intern	alian Intern	Eselon IV yau	Eselon IV ya	ng diberi	Pengawas		
Pemerintah (SPIP)   kewenangan), Pengawas		kewenangan),	kewenangan),	Pengawas	Eksternal dan		
- Laporan   Internal		Intern	Intern	al	Penegak Hukum		
06.06         Penilaian Mandiri Pelaksanaan         Biasa/Terbuka         Pejabat Eselon III (Pejabat	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon	III (Pejabat	Publik,	1	Inspektorat
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Eselon IV yang diberi		Eselon IV yar	Eselon IV yar	ıg diberi	Pengawas		
- Laporan kewenangan), Pengawas		kewenangan),	kewenangan),	Pengawas	Eksternal dan		
Internal	Interna	Intern	Intern	al	Penegak Hukum		

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA